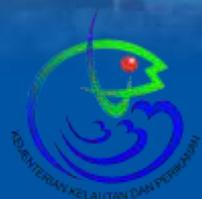




RENSTRA TAHUN 2021-2026



**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**
Jl. Letkol Pol. Toegino-Kuala Tungkal, Tlp/Fax. 0742 21023
Email : diskan.tanjabbarkab@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Penyusunan RENSTRA dimaksudkan untuk menetapkan standar ukuran keberhasilan pembangunan selama lima tahun yaitu tahun 2021-2026 di bidang Kelautan dan Perikanan sekaligus sebagai dasar evaluasi keberhasilan program dan kegiatan dalam tiap tahunnya.

Rencana Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memuat Visi, Misi dan program kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dalam penyusunan ini telah memperhatikan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari semua bidang, kerjasama yang kuat antar pemerintah dengan semua pihak, komitmen dan dukungan DPRD serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Insya Allah Pelaksanaan Renstra Pembangunan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan amanat kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan

Kuala Tungkal, 2 September 2021

KEPALA DINAS,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. 2' with a checkmark-like flourish.

Ir. NETTY MARTINI, M.Sc.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650913 199703 2 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I. PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	29
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan SKPD	31
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3. Telaah RTRW Tanjung Jabung Barat dan KLHS Tanjab Barat	54
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	57
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	75
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	75
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	66

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
BAB VIII. PENUTUP	81

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang meliputi 20 (dua puluh) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah meliputi 5 (lima) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana pembangunan tahunan meliputi 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipakai sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun oleh OPD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah serta berintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

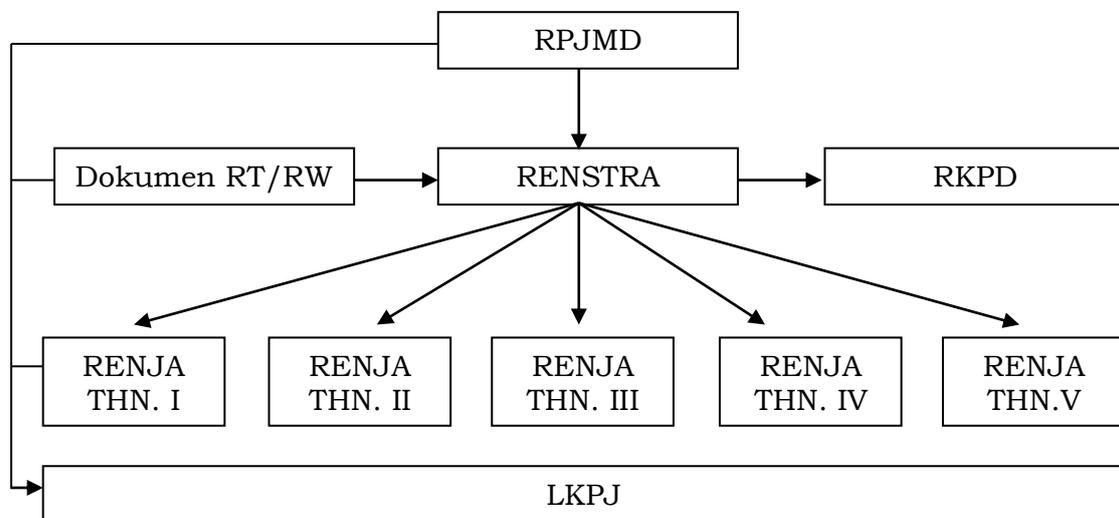
Selain sebagai langkah penyelarasan visi dan misi kepala daerah serta skala prioritas program dan kegiatan, Renstra OPD ini disusun untuk mewujudkan komitmen dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja di lingkungan OPD Pemerintah Daerah. Dengan demikian diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan lebih realistis dan aplikatif, baik ke dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan rencana operasional sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6). Sedangkan, uraian tugas dan fungsi Dinas Perikanan diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan hasil analisis lingkungan *internal* dan *eksternal* yang *responsive* dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta bersifat indikatif.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam implementasinya maka proses penyusunan Renstra OPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* melalui proses yang transparan, demokratis, terpadu dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya. Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut ini :

Gambar 1.1.
Bagan Alur Kedudukan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut agar dapat mencapai sasaran pembangunan perikanan yang baik, tepat dan terarah maka diperlukan adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021 – 2026.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Taktis Strategis untuk menjabarkan potret permasalahan pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti yang telah dituangkan dalam indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dan APBN. Oleh karenanya, landasan penyusunan Renstra Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
18. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perikanan, bagi pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun mendatang dalam bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

1.3.2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 yang bermutu dan akuntabel adalah :

1. Menjabarkan secara umum kondisi urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah Tahun 2021 - 2026;
2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan urusan kelautan dan perikanan tahun 2021 - 2026;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggung jawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAM DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan renstra.

BAB. II.

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SKPD. Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas Pokok “melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang kelautan dan perikanan”. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretariat dan Bidang di Lingkungan Unit Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung jabung Barat adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kerajinan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- 3) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengelolaan barang milik / kekayaan negara; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

2) Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan tangkap.

Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidaang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perikanan tangkap;
- 2) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis kenelayanan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana pemberdayaan nelayan kecil, kemitraan usaha nelayan, dan kelembagaan nelayan;
- 3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perijinan, rekomendasi, pemungutan pajak dan retribusi, serta pengawasan dan pembinaan usaha perikanan tangkap;
- 4) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sarana prasarana penangkapan ikan, pengawasan mutu hasil perikanan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

3) Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan, pengelolaan, pengembangan benih, penyediaan sarana dan prasarana, pencegahan, pengendalian hama dan penyakit ikan di bidang perikanan budidaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang perikanan budidaya;
- 2) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis budidaya ikan, pemantauan dan evaluasi cara pembesaran dan pembenihan ikan, serta pengembangan sarana dan prasarana budidaya ikan ;
- 3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis budidaya ikan, pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha, pembinaan kelembagaan usaha pembudidayaan, pengembangan sarana dan prasarana usaha budidaya, dan promosi hasil perikanan budidaya;
- 4) Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan budidaya perikanan, bimbingan teknis mutu pakan ikan, pencegahan hama penyakit ikan, pengawasan obat ikan, pencegahan hama penyakit ikan, pengawasan obat ikan, penyediaan data dan informasi pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan, lingkungan dan pengembangan demplot percontohan budidaya ikan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Struktur Organisasi

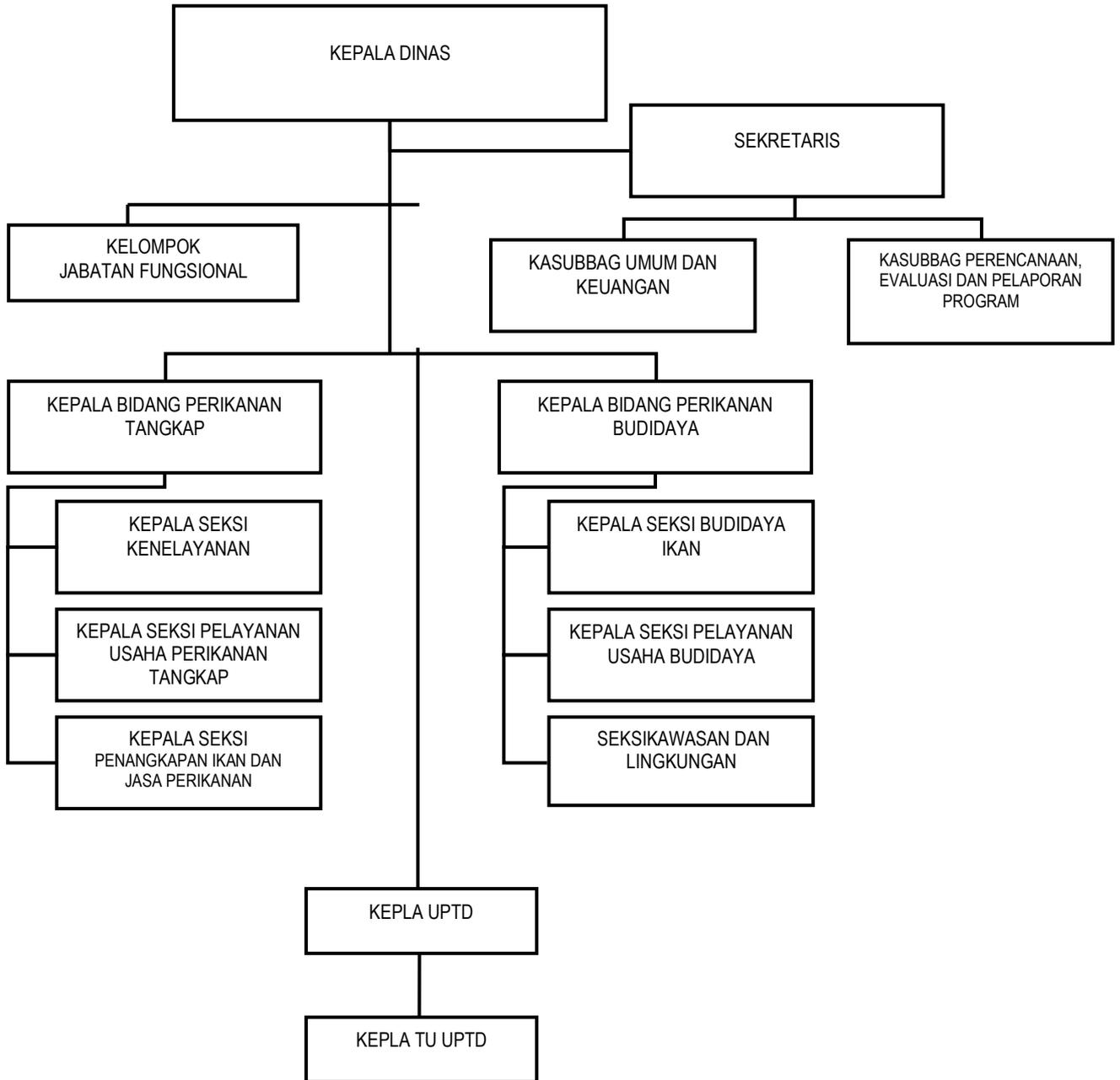
Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unit Perangkat Daerah Dinas Perikanan yang ditetapkan dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dinas tipeologi C. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas;
2. 1 (satu) orang Sekretaris;
3. 2 (dua) orang Kepala Bidang;
4. 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian;
5. 6 (enam) orang Kepala Seksi;
6. 1 (satu) Orang Kepala UPTD; dan
7. 1 (satu) Orang Kepala TU UPTD.

Setiap Bidang dibantu oleh staff/fungsional umum sebagai unsur teknis pelaksana. Selengkapnya mengenai Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1. sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Perikanan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Berdasarkan data kepegawaian pada tahun 2020, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai personil sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

- 1) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Golongan IV, sebanyak 3 Orang terdiri dari :
 - Golongan IV/c : 1 Orang
 - Golongan IV/b : 1 Orang
 - Golongan IV/a : 1 Orang
 - b. Golongan III, sebanyak 18 Orang terdiri dari :
 - Golongan III/d : 6 Orang
 - Golongan III/c : 6 Orang
 - Golongan III/b : 3 Orang
 - Golongan III/a : 3 Orang
 - c. Golongan II, sebanyak 3 Orang terdiri dari :
 - Golongan II/d : 3 Orang
 - Golongan II/c : 0 Orang
 - Golongan II/b : 0 Orang
- 2) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 1 Orang terdiri dari :
 - Master Science – M.Sc. : 1 Orang
 - b. Sarjana (S1), sebanyak 31 Orang terdiri dari :
 - Sarjana Perikanan : 16 Orang
 - Sarjana Ekonomi : 5 Orang
 - Sarjana Hukum : 1 Orang
 - Sarjana Pertanian : 3 Orang

- Sarjana Peternakan : 1 Orang
 - Sarjana Pemerintahan : 1 Orang
 - Sarjana Pendidikan : 1 Orang
 - Sarjana Komunikasi : 2 Orang
 - Sarjana Sosial : 1 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma/DIII) sebanyak 1 Orang
- d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 19 Orang
- 3) Menurut Eselon, Pegawai Dinas Perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Eselon II, sebanyak 1 Orang
 - b. Eselon III, sebanyak 3 Orang
 - c. Eselon IV, sebanyak 10 Orang
 - d. Non Eselon, sebanyak 44 Orang
- 4) Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. PNS, sebanyak 24 Orang
 - b. Tenaga/Petugas Penunjang Kegiatan dengan Perjanjian (Kontrak) sebanyak 34 Orang

2.2.2. Aset/Modal

Dinas Perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati tanah seluas 1.200 M² dengan luas bangunan 420 M² yang terdiri dari Gedung Utama Kantor, Ruang pertemuan dan Mushola. Sedangkan untuk menunjang kegiatan Administrasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh fasilitas Komputer desktop/laptop sebanyak 22 Unit, Air Conditioner sebanyak 7 Unit, dan Printer sebanyak 24 Unit.

Fasilitas Kendaraan Dinas/Operasional yang ada sebanyak 21 Unit dengan rincian sebagai berikut :

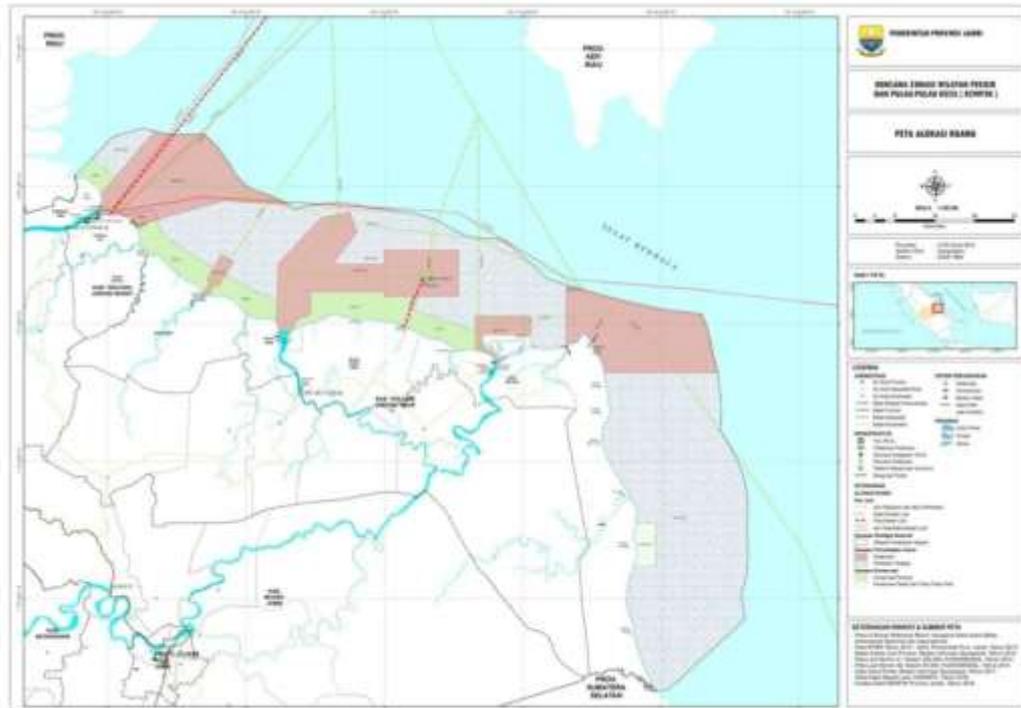
- Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 4 Unit
- Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 21 Unit

Selain itu Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai aset berupa Balai Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau sebanyak 1 Unit, penataan yang menempati tanah seluas kurang lebih 2 Ha. Keberadaan UPT BPATAP tersebut guna memenuhi kebutuhan benih ikan yang berkualitas, sebagai tempat pelatihan pembudidaya ikan dan pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Unit Percontohan Budidaya Air Payau (UPBAP) sebanyak 1 Unit yang menempati tanah seluas 5 Ha, keberadaan UPBAP ini guna menunjang percontohan dan olah teknologi pengembangan budidaya air payau, Pabrik Es sebanyak 2 Unit, Show Room sebanyak 1 Unit dan asset-aset lain penunjang pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari Laut, Pantai rawa, dataran rendah dan dataran tinggi. Sebagian dari wilayah tersebut memiliki sumberdaya alam yang potensial untuk pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan. Wilayah yang potensial untuk usaha perikanan adalah wilayah perairan laut dengan kawasan pantai yang terbentang sepanjang 30,90 KM (Perda Provinsi Jambi Nomor 20 Tahun 2019) mulai dari Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tungkal Ilir sampai Kecamatan Seberang Kota, dan beberapa wilayah Kecamatan di Kawasan Hулunya Potensial Pengembangan usaha perikanan air tawar.

Gambar 2.2
Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (RZWP)



Kegiatan utama usaha sektor Kelautan dan Perikanan adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya (tawar dan payau) dan usaha pengolahan hasil perikanan. Ketiga usaha tersebut memberikan kontribusi dalam penyediaan dan keragaman bahan pangan dari protein hewani, dengan demikian pengembangan usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius.

Perikanan Laut Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara umum laut Provinsi Jambi merupakan bagian dari Laut Cina Selatan, sehingga perhitungan potensi perikanan laut tidak terbatas pada potensi laut kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, meliputi juga potensi pemanfaatan pada perairan lepas pantai Wilayah *pengelolaan perikanan 711* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen-KP/2016, bahkan ZEE Laut Cina Selatan. Potensi Perikanan Laut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Laut provinsi : 77.980 Ton/Tahun
- b. Potensi pemanfaatan Laut Natuna dan ZEEI Laut Cina Selatan ± Satu Juta Ton/Tahun

Potensi lestari penangkapan ikan perairan umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperkirakan sebesar 1.000 ton/tahun yang tersebar di tiga sungai besar yaitu Sungai Pengabuan, Sungai Betara dan Sungai Pangkal Duri yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta anak-anak sungai ketiga sungai tersebut dan rawa-rawa pada kawasan basah.

Potensi pengembangan tambak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 5.000 Ha dan tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara. Kondisi lahannya maupun perairan pantainya cukup baik untuk pengembangan air payau, seperti ikan bandeng, kakap, Bawal, udang dan kepiting.

Komoditas budidaya tambak mempunyai nilai ekonomis tinggi, oleh karena itu pengembangan budidaya tambak harus dibangkitkan kembali dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti tanggul, jalan produksi dan listrik.

Potensi budidaya kolam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperkirakan 2.000 Ha yang tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara papalik dan Kecama Tebing Tinggi. Pada sub kawasan basah cocok untuk pengembangan budidaya ikan yang lebih toleran terhadap perubahan salinitas seperti ikan nila, patin dan ikan-ikan lokal lainnya.

Sejalan dengan semakin besarnya permintaan benih ikan, di beberapa tempat mulai terdapat UPR (Unit Pembenihan Rakyat) ikan. Unit pembenihan rakyat ini berfungsi sebagai penyedia kebutuhan benih bagi pembudidaya ikan. Namun demikian, benih yang dihasilkan tersebut belum optimal dalam memenuhi permintaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga para pembudidaya ikan masih banyak yang mencari benih keluar daerah.

Balai Benih Ikan (BBI) yang sekarang telah berkembang menjadi UPT Dinas Perikanan, mempunyai tugas untuk membina UPR dan memenuhi ketersediaan benih bagi masyarakat pembudidaya air tawar baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

Kedepan pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) diarahkan di daerah ulu, dikarenakan keberadaan BBI yang ada sekarang belum bisa memenuhi kebutuhan benih dalam daerah.

Potensi budidaya ikan dalam Keramba di Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 1.000 Ha (10.000 unit) terutama di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, Batang Asam, Pengabuan, Betara dan Bram Itam. Komoditas Ikan yang cocok dikembangkan dalam Keramba adalah Nila, Lele dan Patin (Kecamatan Pengabuan dan Betara) sedangkan untuk ikan yang tidak mempunyai kemampuan adaptasi tinggi cocoknya dikembangkan di Daerah Ulu, seperti Kecamatan Tungkal Ulu, Batang Asam, dan Kecamatan Merlung.

Potensi Pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sangat potensial untuk dikembangkan, hal ini didukung dengan adanya Sentra Pengolahan Hasil Perikanan yang terus dikembangkan, dengan harapan produk hasil olahan perikanan semakin beragam dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, sekaligus meningkatkan PAD Kabupaten.

Potensi yang ada diperkirakan sekitar 18.000-20.000 ton/tahun yang bisa dimanfaatkan, karena dengan beragamnya hasil olahan perikanan bisa member nilai tambah, baik dari segi kualitas, kuantitas dan harga jual.

Semua potensi tersebut diatas didukung dengan cukup besarnya jumlah pelaku usaha perikanan (nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar) di Daerah, dimana besaran jumlah pelaku usaha perikanan dapat di rinci sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jenis Usaha Perikanan sampai dengan Tahun 2020

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Nelayan (Perairan Laut dan Umum)	3.234 Orang
2.	Pembudidaya Ikan/Udang	1.252 Orang
3.	Kelompok Pengolah	116 Kelompok
4.	Pemasar Hasil Perikanan	105 Orang

Sedangkan jumlah kelompok menurut kelas (pemula dan madya (Berbadan Hukum)) dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini

Tabel 2.2. Jumlah Kelompok Usaha Perikanan sampai dengan Tahun 2020

No	Jenis Usaha	Jumlah	Pemula	Madya (Berbadan Hukum)
1.	Nelayan (Perairan Laut dan Umum)	254	216	38
2.	Pembudidaya Ikan Ikan/Udang	114	103	11
3.	Pengolah dan Pemasar	116	110	6

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan ditunjukkan dengan ketersediaan layanan terkait tugas dan fungsi yang melekat tersebut yakni pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dari potensi perikanan dan kelautan yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telah dilaksanakan pembangunan perikanan dan kelautan selama 5 (lima) tahun terakhir (2016 - 2020). Penjabaran kinerja layanan Dinas Perikanan selanjutnya yaitu kinerja layanan yang melekat pada sasaran beserta indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni 2016 sampai dengan 2020, Adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-	Ton	1.895	2.102	1.985,00	2.084,00	2.150,00	1.730,00	1.648,00	1.561,00	1.296,00	1.135,00	91,29	78,40	78,64	62,19	52,79
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Umum dan Laut)	-	Ton	21.734,00	22.790,00	23.929,00	25.125,00	26.884,00	23.157,00	21.503,00	22.361,00	21.901,00	22.442,00	106,55	94,35	93,45	87,17	83,48
Jumlah Produksi Benih Ikan	-	Ekor	476.000,00	550.000,00	630.000,00	680.000,00	710.000,00	976.416,00	824.730,00	764.517,00	725.380,00	764.354,00	205,13	149,95	121,35	106,67	107,66
Persentase Tingkat Pelestarian Sumberdaya Perikanan	-	%	60	60	70	70	70	65	70	83	85	87	108,33	116,67	118,57	121,43	124,29
Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kpt/Thn)	-	Kg/Kapita/Tahun	32,07	32,80	33,00	33,45	33,93	33,35	33,42	33,83	33,68	35,79	103,99	101,89	102,52	100,69	105,48

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

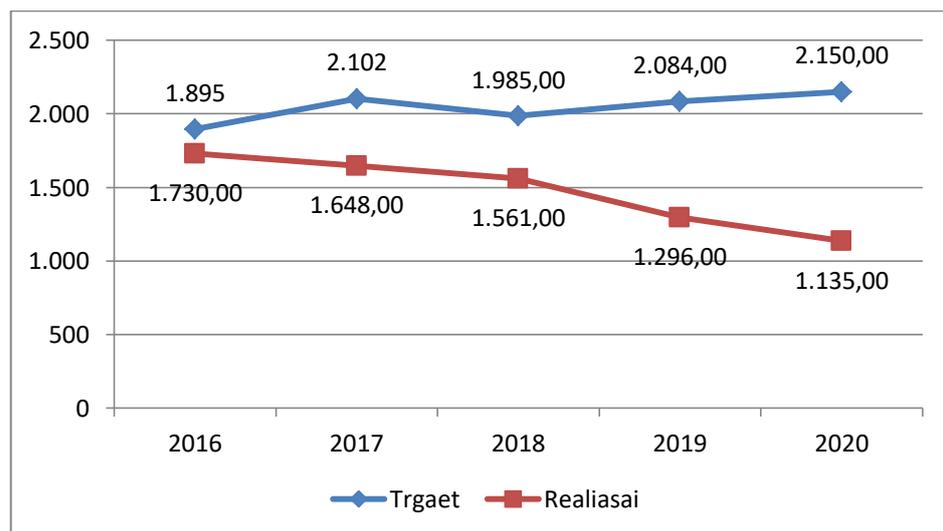
Uraian pencapaian kinerja pembangunan perikanan dan kelautan selama lima tahun terakhir sebagai berikut:

1) Produksi Perikanan Budidaya

Selama kurun waktu 2016-2020 produksi perikanan budidaya mengalami trend Penurunan dari 1.730,22 Ton di tahun 2016 menjadi 1.135 ton di tahun 2020.

Perkembangan produksi perikanan budidaya selama lima tahun terakhir jika digambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3.
Perkembangan Produksi Budidaya Ikan (Ton) dari Tahun 2016 s/d 2020



Dilihat dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2016– 2017 produksi perikanan budidaya perikanan mengalami trend penurunan akan tetapi pada tahun 2018 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2018-2020 produksi perikanan budidaya terus mengalami tren penurunan, hal ini disebabkan karena banyaknya tambak yang berubah fungsi menjadi kebun tanaman tahunan, akan tetapi mulai tahun 2016 Dinas Perikanan telah mencoba untuk memberikan pengertian kepada masyarakat melalui pelatihan budidaya ikan, sosialisasi, pelatihan manajemen KUB dan bantuan sarana dan prasarana budidaya tambak, dengan demikian secara langsung dan bertahap produksi perikanan budidaya tambak mulai menunjukkan kenaikan, walau belum signifikan, diharapkan kedepan produksi perikanan budidaya tambak bisa meningkat sesuai yang ditargetkan.

Secara umum Kinerja produksi perikanan budidaya (Tambak, Kolam, KJA/KJT/Mina Padi) Dinas Perikanan pada lima tahun perencanaan tidak dapat memenuhi Target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak lepas dari permasalahan yang ada, terutama permasalahan yang tidak terduga, permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

- a. Banyaknya luasan lahan budidaya tambak yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan.
- b. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat pembudidaya ikan, dimana sebahagian besar masyarakat pembudidaya masih menggunakan cara tradisonal dalam system budidaya ikan.
- c. Terhambatnya bantuan ikan dan pakan kepada masyarakat, dikarenakan kebanyakan Kelompok Pembudidaya Ikan yang ada tidak memenuhi kriteria dalam peraturan yang ada, yang diharuskan pada kelompok untuk berbadan hukum.
- d. Sarana dan Prasarana budidaya yang ada belum berfungsi secara optimal.
- e. Terbatasnya permodalan bagi pembudidaya ikan.
- f. Pasar yang belum pasti, sehingga masyarakat pembudidaya ikan masih ragu dalam pembudidaya ikan dalam skala besar.
- g. Masa pandemic COVID-19, beimbias pada melumpuhnya semua sector ekonomi, khususnya sector perikanan.

Solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut untuk peningkatan produksi perikanan budidaya adalah :

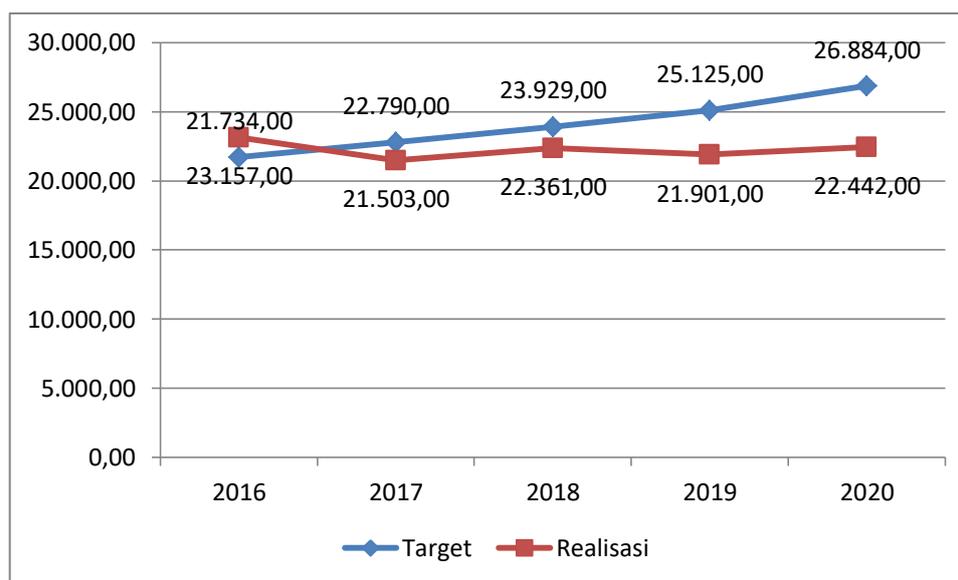
- a. Mendorong kembali kepada masyarakat pembudidaya ikan, khususnya pembudidaya ikan tambak untuk berusaha kembali budidaya ikan, dengan cara memberikan bantuan stimulant kepada masyarakat untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berusaha budidaya ikan kembali.
- b. Memberikan pelatihan secara bertahap tentang cara budidaya ikan yang baik dan benar.
- c. Untuk diperhatikan bahwasannya terlambatnya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya merupakan permasalahan klasik yang hampir tiap tahun, sehingga diharapkan pada tahun yang akan datang dapat dilaksanakan dengan segera, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan cepat.

2) Produksi Perikanan Tangkap (Perikanan Laut dan Umum)

Produksi perikanan tangkap (Perairan Laut dan Perairan Umum) setiap tahunnya hasil perikanan tangkap berada diatas 20.000 ton per tahun, dengan rata – rata hasil perikanan laut dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah 21.566 ton per tahun.

Perkembangan produksi perikanan tangkap (perairan laut dan perairan umum) selama 5 (lima) tahun terakhir jika digambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4.
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap (Laut dan Umum) (Ton)
dari Tahun 2016-2020



Secara umum Kinerja (produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum) Dinas Perikanan pada lima tahun terakhir tidak dapat memenuhi Target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak lepas dari permasalahan yang ada, terutama permasalahan yang tidak terduga, permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

- a. Adanya revitalisasi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Trawl/pukat) dengan alat tangkap yang ramah lingkungan dan diperbolehkan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga masyarakat/nelayan belum terbiasa dalam penggunaannya.
- b. Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan secara teknis nelayan dalam penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dibantu oleh pemerintah, karena rata-rata nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebahagian besar masih berusaha secara tradisional.
- c. Kurangnya permodalan yang dapat disediakan dan belum dapat berkembangnya investor yang berusaha dibidang perikanan secara profesional.
- d. Telah terjadinya indikasi *over fishing* di daerah penangkapan utama, yang berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan.
- e. Adanya indikasi pencemaran lingkungan, baik yang berasal dari sampah rumah tangga maupun industry.
- f. Terjadi pandemic COVID-19, dimana imbas dari pandemic ini melumpuhkan semua sector ekonomi, khususnya sector perikanan.

Tidak tercapainya Indikator Kinerja Dinas pada tahun 2020 tersebut, yang paling utama disebabkan karena kondisi alam (Eksternal) yang tidak dapat diduga, karena sumberdaya perikanan dan kelautan merupakan sumberdaya yang sangat tergantung oleh banyak faktor, mulai dari lingkungan, kualitas air, sarana dan prasarana infrastruktur penunjang lainnya, sehingga capaian kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

Solusi/pemecahan masalah yang dirasa bisa mengatasi hal tersebut adalah :

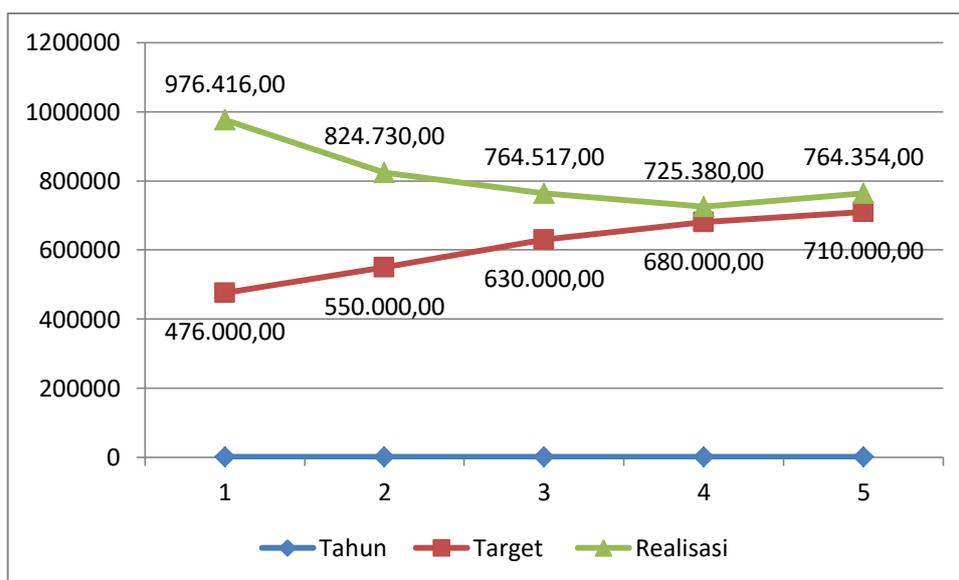
- a. Dengan adanya revitalisasi alat tangkap ini secara langsung sangat dirasakan berkurangnya jumlah penangkapan, akan tetapi kalau tidak diterapkan pada saat ini dipastikan sumberdaya ikan dan lingkungannya akan rusak, dengan adanya revitalisasi ini diharapkan sumberdaya ikan dan lingkungan dapat berkembang dan pada tahun depan dapat meningkat produksinya.
- b. Perlu adanya pelatihan khusus kepada nelayan, khususnya nahkoda, dikarenakan masih banyak nahkoda kapal penangkapan ikan yang tidak memiliki sertifikasi kenahkodaan, sehingga dalam penggunaan sarana dan prasarana masih banyak yang belum bisa memanfaatkan secara optimal.
- c. Mulai tahun 2017 telah dilakukan kredit ringan kepada nelayan, dan sampai saat ini masih dilakukan pendataan kepada nelayan, sehingga diharapkan dengan adanya pendataan ini dan masyarakat nelayan telah mendapatkan kartu KUSUKA, akses permodalan melalui Bank dapat dengan mudah didapatkan, sehingga nelayan tidak lagi tergantung pada “rentenir”.
- d. Perlu adanya revitalisasi mangrove, dimana mangrove merupan sebagai nursery ground bagi sebahagian sumberdaya ikan, sehingga diharapkan dengan adanya revitalisasi mangrove ikan dapat berkembang kembali secara normal.
- e. Perlu adanya pencegahan melalui sosialisasi akan pentingnya menjaga lingkungan.

3) Jumlah Produksi Benih Ikan

Produksi benih ikan setiap tahun berada diatas 700.000 ekor per tahun, dengan rata – rata produksi benih ikan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 adalah 826.208,60 Ekor per tahun.

Perkembangan produksi benih ikan selama 5 (lima) tahun terakhir jika digambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :

Gambar 2.5.
Perkembangan Produksi Benih Ikan (Ekor)
dari Tahun 2016 s/d 2020



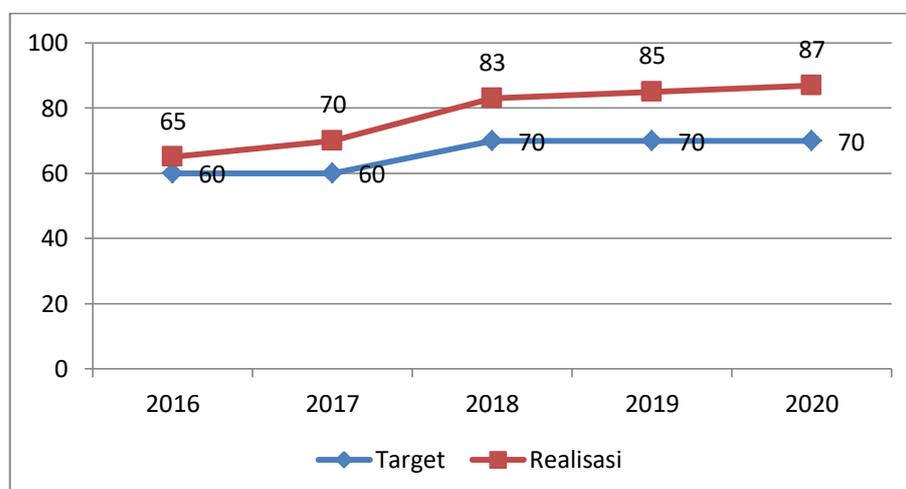
4) Persentase Tingkat Pelestarian Sumberdaya Perikanan

Tingkat pelestarian sumberdaya perikanan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami trend peningkatan, hal ini dikarenakan gencarnya sosialisai dan penyuluhan pelestarian sumberdaya perikanan bagi pelaku usaha perikanan secara langsung maupun tidak.

Perkembangan tin

ngkat pelestarian sumberdaya perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir jika digambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :

Gambar 2.6.
Perkembangan Persentase Tingkat Pelestarian Sumberdaya Ikan (%)
Tahun 2016 s/d 2020

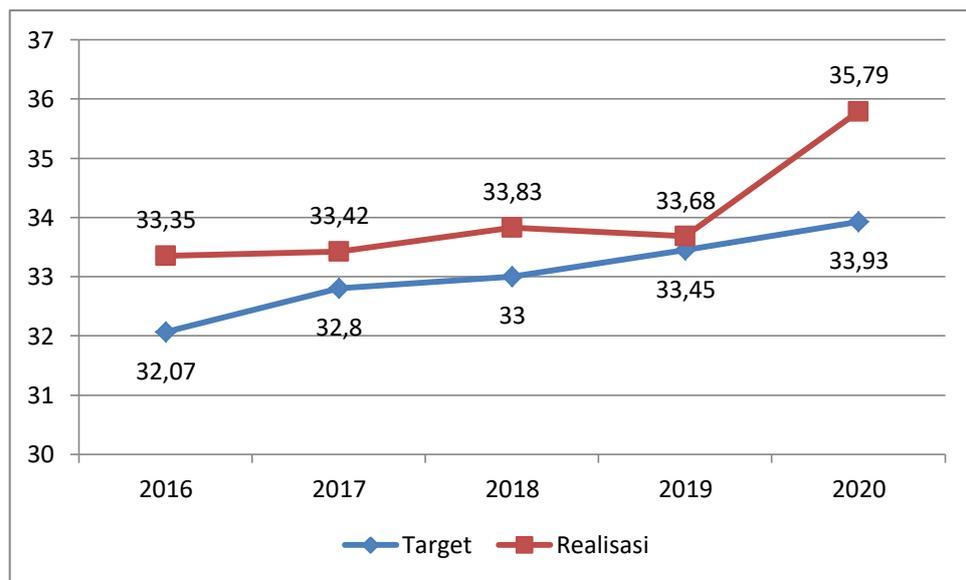


5) Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kpt/Thn)

Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan pemerintah adalah Angka konsumsi ikan perkapita. Tingkat Konsumsi ikan masyarakat Tanjung Jabung Barat masih dibawah standar Provinsi dan Nasional. Pergerakan peningkatan Tingkat konsumsi ikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkesan lambat bahkan pada tahun 2019 terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2018, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup baik.

Perkembangan jumlah konsumsi ikan masyarakat selama 5 (lima) tahun terakhir jika digambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :

Gambar 2.7.
Perkembangan Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kpt/Thn)
Tahun 2016 s/d 2020



Pembahasan selanjutnya yaitu terkait kinerja anggaran, kinerja anggaran ditinjau dari perbandingan antara pagu dengan realisasi belanja. Peninjauan terhadap kinerja anggaran idealnya dilakukan terhadap kinerja anggaran lima tahun terakhir yakni 2016 – 2020 sama halnya dengan kinerja pelayanan Dinas Perikanan. Berikut adalah table kinerja anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 2.4. Review Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021

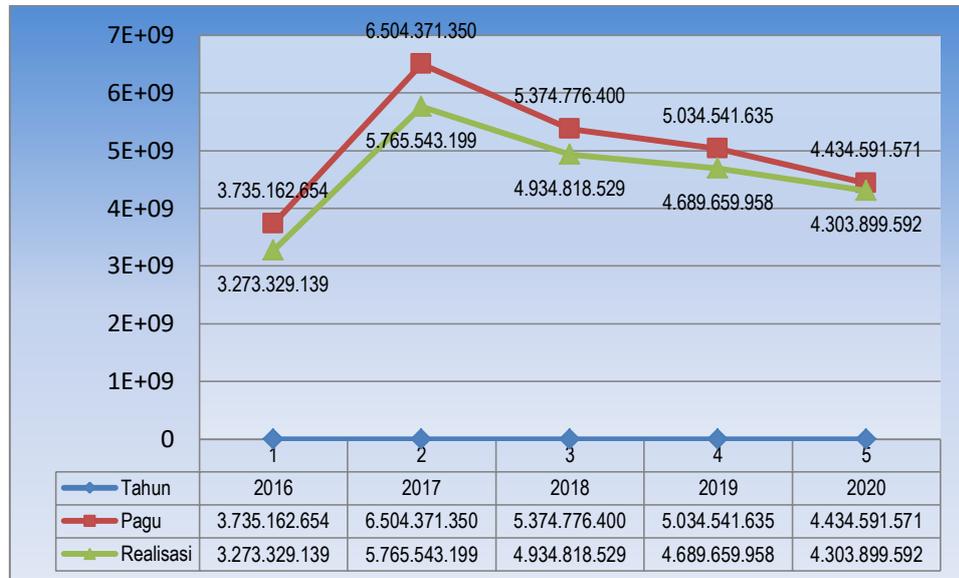
No.	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Presentase Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	469.777.654	549.066.850,00	1.090.059.850,00	887.300.635,00	731.847.301,00	437.655.901	502.191.674,00	1.044.664.396,00	871.662.598,00	717.884.298,00	93,16	91,46	95,84	98,24	98,09
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	390.265.000,00	832.190.000,00	423.470.000,00	365.110.000,00	213.500.000,00	325.362.455	711.640.807,00	305.758.648,00	295.826.865,00	194.732.084,00	83,37	85,51	72,20	81,02	91,21
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	39.700.000,00	26.800.000,00	25.550.000,00	25.550.000,00	27.000.000,00	39.530.000	24.275.000,00	21.820.000,00	21.619.000,00	23.743.500,00	99,57	90,58	85,40	84,61	87,94
4	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	25.000.000,00	55.000.000,00	44.000.000,00	48.150.000,00	0,00	23.250.000	35.700.000,00	37.150.000,00	42.900.000,00	0,00	93,00	64,91	84,43	89,10	0,00
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	251.375.000,00	195.525.000,00	133.956.000,00	43.998.000,00	64.125.000,00	238.283.278	169.590.400,00	81.960.000,00	32.050.000,00	63.480.000,00	94,79	86,74	61,18	72,84	98,99
6	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	196.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.523.933	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	84.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.752.000	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pengembangan Perikanan Tangkap	150.050.000,00	2.613.112.500,00	2.647.896.400,00	2.228.322.000,00	2.110.392.000,00	148.049.980	2.302.177.424,00	2.564.184.485,00	2.201.626.400,00	2.085.870.450,00	98,67	88,10	96,84	98,80	98,84
9	Pengembangan Budidaya Perikanan	0,00	2.232.677.000,00	1.009.844.150,00	1.135.741.000,00	1.098.215.000,00		2.019.967.894,00	879.281.000,00	959.751.000,00	1.032.675.790,00	0,00	90,47	87,07	84,50	94,03
10	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	125.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.348.500	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.890.000	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pengembangan Budidaya Keramba dan Kolam	365.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.827.842	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP)	301.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.690.000	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	534.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.276.250	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Restocking (Penebaran Kembali Benih Ikan di Perairan Umum/Laut)	183.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.385.000	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pengawasan Penangkapan Ikan	283.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.519.000	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan dan Kelautan	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.985.000	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	124.350.000,00	63.435.000,00	0,00	0,00	0,00	110.127.095,00	62.925.000,00	0,00	0,00	0,00	88,56	99,20
19	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	176.020.000,00	126.077.270,00	0,00	0,00	0,00	154.097.000,00	122.588.470,00	0,00	0,00	0,00	87,55	97,23
<i>Jumlah</i>		<i>3.735.162.654,00</i>	<i>6.504.371.350,00</i>	<i>5.374.776.400,00</i>	<i>5.034.541.635,00</i>	<i>4.434.591.571,00</i>	<i>3.273.329.139,00</i>	<i>5.765.543.199,00</i>	<i>4.934.818.529,00</i>	<i>4.689.659.958,00</i>	<i>4.303.899.592,00</i>	<i>87,64</i>	<i>88,64</i>	<i>91,81</i>	<i>93,15</i>	<i>97,05</i>

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Perkembangan jumlah anggaran Dinas Perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir jika digambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :

Gambar 2.8.
Perkembangan Jumlah Anggaran Selama Lima Tahun



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan pembahasan terhadap kinerja layanan Dinas Perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat diketahui tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perikanan 5 (lima) tahun kedepan. Yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan bidang kelautan dan perikanan sesuai kewenangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya sarana dan prasarana produksi perikanan dan pemasaran hasil produk olahan ikan;

- b. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha sektor perikanan;
- c. Belum optimalnya penerapan metode CBIB, CPIB dan higienitas serta sanitasi dalam pengolahan produk olahan ikan;
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan benih ikan;
- e. Fungsi TPI belum berjalan secara optimal;
- f. Masih rendahnya tingkat kemandirian kelompok pelaku usaha perikanan (khususnya pelaku usaha skala kecil);
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang konservasi lingkungan.

2.4.2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang menjadi peluang dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Potensi perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih bisa dikembangkan untuk menjadi usaha/produk unggulan daerah, yang akan menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu lumbung ikan nasional;
- b. Masih terbukanya peluang pasar ekspor produk hasil perikanan;
- c. Sarana-prasarana pendukung bidang kelautan dan perikanan sudah tersedia dengan cukup baik;
- d. Minat masyarakat untuk melakukan usaha di bidang perikanan masih cukup tinggi;
- e. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan sumberdaya perikanan sudah cukup baik;
- f. Tersedianya dukungan anggaran yang cukup baik dari APBD Kab, Propinsi maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja layanan yang selama 5 (lima) tahun terakhir ada target kinerja yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Berikut adalah uraian beberapa permasalahan yang teridentifikasi:

Tabel. 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Urusan Kelautan dan Perikanan

Sasaran	Permasalahan
<p>Meningkatnya Usaha Perikanan yang Berkelanjutan dan Mandiri</p>	<p>1. Belum Optimalnya Produksi Perikanan Tangkap dikarenakan beberapa permasalahan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya revitalisasi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Trawl/pukat) dengan alat tangkap yang ramah lingkungan dan diperbolehkan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga masyarakat/nelayan belum terbiasa dalam penggunaannya. ✓ Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan secara teknis nelayan dalam penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang dibantu oleh pemerintah, karena rata-rata nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebahagian besar masih berusaha secara tradisional. ✓ Kurangya permodalan yang dapat disediakan dan belum dapat berkembangnya investor yang berusaha dibidang perikanan secara profesional. ✓ Telah terjadinya indikasi <i>over fishing</i> di daerah penangkapan utama, yang berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan. ✓ Adanya indikasi pencemaran lingkungan, baik yang berasal dari sampah rumah tangga maupun industry. ✓ Terjadi kebakaran hutan/lahan yang menyebabkan kabut asap, sehingga nelayan banyak yang tidak melaut. <p>2. Belum Optimalnya Produksi Budidaya Perikanan dikarenakan beberapa permasalahan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Banyaknya luasan lahan budidaya tambak yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian maupun perkebunan ✓ Masih rendahnya pengetahuan masyarakat pembudidaya ikan, dimana sebahagian besar masyarakat pembudidaya masih menggunakan cara tradisional dalam system budidaya ikan.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terhambatnya bantuan ikan dan pakan kepada masyarakat, dikarenakan kebanyakan Kelompok Pembudidaya Ikan yang ada tidak memenuhi kriteria dalam peraturan yang ada, yang diharuskan pada kelompok untuk berbadan hukum. ✓ Terbatasnya permodalan bagi pembudidaya ikan. ✓ Pasar yang belum pasti, sehingga masyarakat pembudidaya ikan masih ragu dalam pembudidaya ikan dalam skala besar. ✓ Terjadi kemarau panjang, sehingga penebaran benih terhambat, dikarenakan sumber air banyak yang mengalami kekeringan. <p>3. belum optimalnya industri pengolahan hasil perikanan dikarenakan beberapa permasalahan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat serapan pasar masih rendah, terutama pasar lokal. Rendahnya pengetahuan teknologi nelayan dan pembudidaya ikan/udang belum mampu meningkatkan produktivitas, sehingga timbul ketidakpastian bahan baku. ✓ Belum optimalnya keperpihakan pemerintah melalui anggaran peningkatan ekonomi pelaku usaha perikanan yang masih sangat kecil, sehingga industry pengolahan ikan “jalan ditempat”. <p>4. Belum optimalnya pengawasan UU <i>fishing</i> dikarenakan beberpa permasalahan, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengawasan Sumberdaya Kelautan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Provisnis, dimana tenaga Pengawasa (PPNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sangat terbatas, sehingga kewenangan pengawasan sumberdaya kelautan menjadi kewenangan provinsi, maka dinas kabupaten tidak mempunyai kewenangan pengawasan di perairan laut. ✓ Belum optimalnya pengawasan Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMASWAS), dikarenakan Sarana dan Prasarana operasional pengawasan masih terbatas.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih belum optimalnya koordinasi penegakan hukum pengawasan UU fishing. <p>5. Belum optimalnya Infrastruktur seperti jalan dan listrik di daerah yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Jaringan jalan dan listrik di Sentra Produksi perikanan, khususnya perikanan budidaya tambak yang berlokasi di Kecamatan Kuala Betara dan dan Kecamatan Seberang Kota sampai saat ini masih belum terhubung sampai ke daerah usaha pertambakan, sehingga dalam pengembangan dan pemanfataannya masih menggunakan cara tradisional dalam usaha budidaya tambak (Udang dan Bandeng).</p> <p>6. Belum optimalnya kapasitas SDM pelaku usaha perikanan, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha perikanan (Nelayan dan pembudidaya ikan), dimana nelayan, khususnya Nahkoda kapal banyak yang belum mempunyai sertifikat nahkoda, sehingga nahkoda kapal belum mampu mengoperasikan alat bantu penangkapan ikan, seperti penggunaan <i>GPS Fishfinder</i>, sedangkan pembudidaya ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan usaha sampingan dan bukan usaha utama, sehingga pengetahuan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) masih sangat minim, dari permasalahan tersebut menyebabkan hasil produksi usaha perikanan belum maksimal dan belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. ✓ Masih terbatasnya tenaga ahli pembenihan ikan, sehingga sebagian besar benih ikan masih didatangkan dari luar daerah. <p>7. Belum optimalnya pengaplikasian iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi;</p> <p>Penjabaran dari permasalahan ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam usaha penangkapan ikan belum mampu membuat inovasi penangkapan ikan yang dapat meningkatkan jumlah produksi dan peningkatan pendapatan nelayan.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dalam usaha budidaya inovasi dalam pengaplikasian teknologi budidaya ikan belum maksimal, khususnya aplikasi budidaya ikan dalam kolam terpal (biflog). ✓ Inovasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih minim, sehingga daerah belum mampu menjual hasil pengolahan perikanan secara massif.
--	--

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi pembangunan perikanan merupakan koridor utama yang mengawal kesinergisan dan perjalanan sektor perikanan menuju kondisi yang dicita-citakan. Sebagai bagian dari perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat, visi sektor perikanan selayaknya dapat menjadi penggenap visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Misi adalah ungkapan eksistensi sebuah organisasi yang dijabarkan dalam bentuk rangkaian kalimat dalam rangka mencapai visi. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Visi :

“Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Adapun makna yang terkandung dalam visi yang sudah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

VISI	TERJEMAHAN VISI VERSI RANCANGAN RPJMD
B erkualitas	Sumber daya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah
E konomi Maju	Meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup
R eligius	Berlandaskan nilai-nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat
K ompetitif	Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah
A man	Suasana aman dan tertib sehingga masyarakat nyaman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.
H armonis	Terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan berdasarkan visi tersebut dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu dan Berakhlak	Menjadikan Masyarakat yang Berdaya Saing Dilandasi Iman dan Taqwa serta Berakhlak Mulia	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
2.	Cipta Kondisi Sosial yang Tentram, Tertib dan Harmonis	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat 2. Terjaganya kelestarian, nilai kejuangan, dan pengembangan budaya daerah
3.	Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 3. Meningkatnya kinerja perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah
4.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan	1. Meningkatnya perekonomian kabupaten 2. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
5.	Pemerataan Pembangunan daerah dari Desa sampai Kota	Mengurangi Kesenjangan Pembangunan Desa dan Kota	1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat 2. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota, dan daerah perbatasan

Berlandaskan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 maka Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang bersinergi dan mendukung visi misi Kepala Daerah. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan secara terperinci dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN
1.	<i>MISI 3 :</i> Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	✓ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
4.	<i>MISI 4 :</i> Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan	✓ Meningkatnya Perekonomian Kabupaten

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 tersebut, maka Dinas Perikanan menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan kabupaten tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I, Renstra Dinas Perikanan Provinsi Jambi, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3.3.1. Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rencana Strategis Dinas Perikanan tidak terlepas dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Renstra KKP telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024.

3.3.1.1. Visi

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya Rencana Strategis, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 2020-2024 telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

3.3.1.2. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat empat pilar yang menjadi Misi KKP yakni :

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

3.3.1.3. Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
 - b. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:
 - a. Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. Meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan e. optimalnya pengelolaan ruang laut.

3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

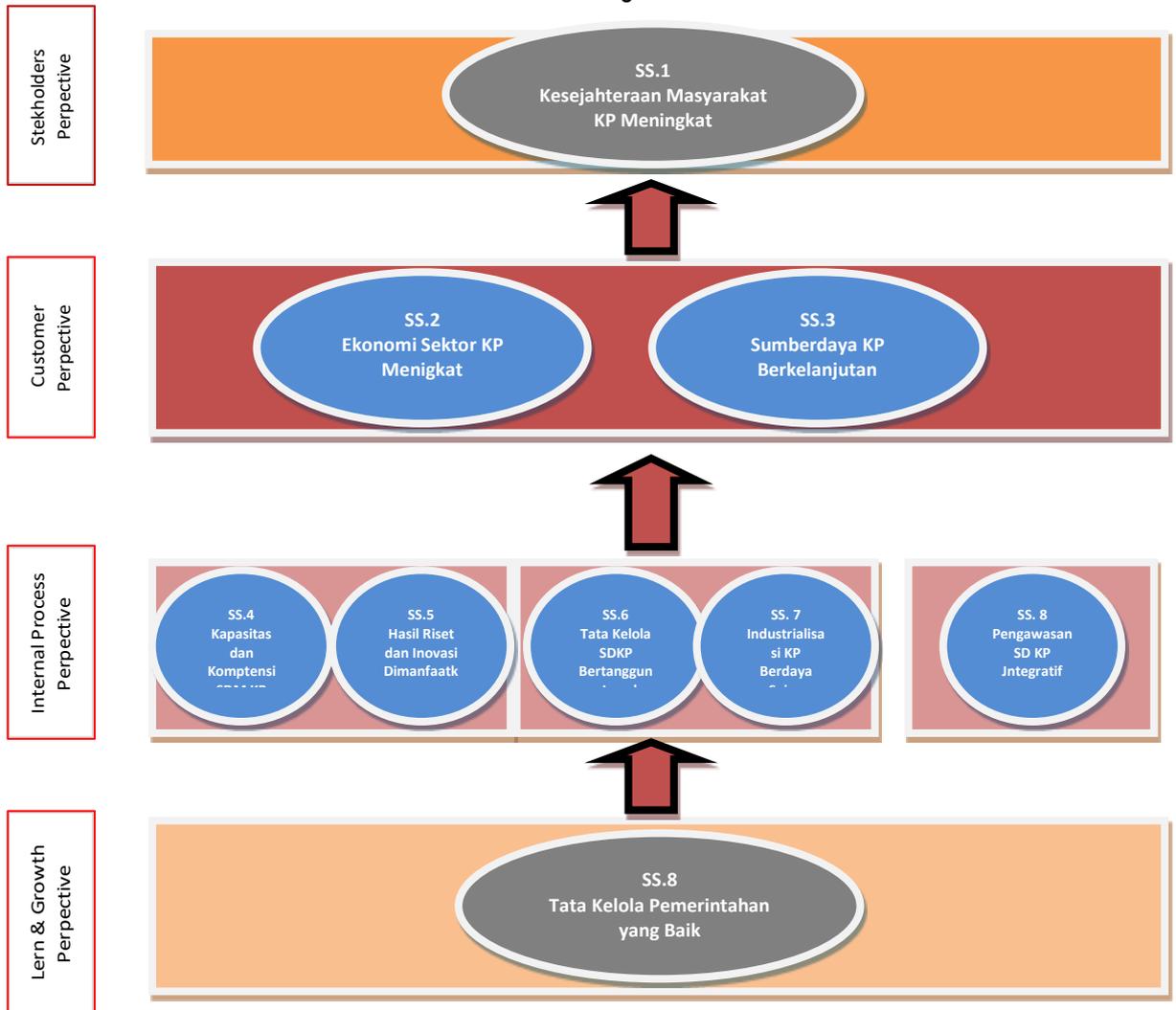
3.3.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
- SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
- SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
- SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, dengan Peta Strategi sebagai berikut:

Gambar 3.1.
Peta Startegi KKP



3.3.1.5. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arah Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir yaitu :

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, memperkuat komitmen pelaksanaan target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-14 yakni

Ekosistem Lautan (Life Below Water), dan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, industrialisasi, dan penguatan riset dan inovasi;

2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentrasentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan/Strategis Nasional Tertentu (PKSN/T), sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau budidaya (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pada tahun 2020 terdapat tiga belas SKPT yaitu SKPT Natuna, SKPT Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Saumlaki, SKPT Sabang, SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, SKPT Mentawai, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Moa, SKPT Biak, dan SKPT Timika;
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan serta percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui Gemarikan;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan melalui perlindungan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut; dan
6. memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Kemanan dan transformasi pelayanan publik melalui penguatan keamanan laut, pembangunan dan operasional armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju, serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga. Pencapaian peran tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan prioritas nasional sebagaimana tersebut di atas.

3.3.1.6. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri dari:

1. memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan lima arah kebijakan tersebut, KKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Disamping itu, KKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020- 2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital. Strategi pelaksanaan arah kebijakan, terdiri dari:

1. arah kebijakan “Memperbaiki komunikasi dengan nelayan evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:
 - a. membuka komunikasi dengan stakeholders untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual;
 - b. optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, termasuk optimalisasi kelembagaannya, baik WPPNRI di laut maupun perairan darat;

- c. penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan sebagai basis pengelolaan sumber daya ikan yang maju dan berkelanjutan;
 - d. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
 - e. pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Major Project RPJMN 2020-2024), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
 - f. eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
 - g. fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran BLU-LPMUKP/Bank Nelayan;
 - h. peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, dan perlindungan HAM Perikanan;
 - i. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (Major Project RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, pemerintah daerah, dan swasta;
 - j. pengelolaan perikanan di perairan umum;
 - k. pengembangan armada perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - l. partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs);
 - m. pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
 - n. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
 - o. penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
2. Arah kebijakan “Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein

hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha, infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budidaya, dan sinergisitas program dengan lintas sektor” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:

- a. akselerasi peningkatan produksi aquaculture/perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya;
- b. pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (Major Project RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha/swasta;
- c. pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau, dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan. Komoditas utama antara lain udang, nila, lele/patin, bandeng, dan rumput laut;
- d. pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan dan pakan alami;
- e. pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan broodstock center, serta modernisasi teknologi;
- f. pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan termasuk di kawasan minapolitan dan SKPT didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern;
- g. pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui surveillance hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu;
- h. pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
- i. pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;

- j. peningkatan kerja sama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran, dan data perikanan budidaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lintas sektoral di tingkat nasional maupun internasional;
 - k. penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudi daya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan, asuransi usaha perikanan budidaya, serta pendampingan teknis;
 - l. pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan regulasi yang kondusif;
 - m. pengembangan SKPT; dan
 - n. penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan budidaya.
3. Arah kebijakan “Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:
- a. peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas industri pengolahan ikan/udang, dan rumput laut;
 - b. peningkatan standardisasi, ketelusuran (traceability), jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
 - c. penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan, dan pemantauan logistik hasil perikanan;
 - d. pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dan penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI);
 - e. pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
 - f. peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
 - g. pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi stunting;
 - h. perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala

internasional, penguatan branding produk kelautan dan perikanan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;

- i. pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pengembangan kawasan pengolahan, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (Major Project RPJMN 2020-2024) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
- j. pemetaan preferensi, konsumsi, dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
- k. peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG);
- l. penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil kelautan dan perikanan, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
- m. peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan;
- n. pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste;
- o. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan;
- p. peningkatan ragam baru (diversifikasi) produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut, dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
- q. fasilitasi kemudahan pelaku usaha untuk berinvestasi, mengakses pembiayaan, teknologi dan pasar, serta didukung regulasi yang kondusif;
- r. pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- s. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan usaha;
- t. harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi, dan ketelusuran produk (traceability);
- u. pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;

- v. penguatan laboratorium acuan penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan, serta jejaring laboratorium keamanan pangan hasil perikanan;
 - w. peningkatan layanan sertifikasi ekspor/impor/domestik berbasis elektronik, penyederhanaan layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - x. pengembangan SKPT; dan
 - y. penguatan Unit Pelaksana Teknis mutu hasil perikanan dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
4. arah kebijakan “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pesisir dan laut;
 - b. perbaikan dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir yang rusak melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
 - d. peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, rehabilitasi mangrove, dan terumbu karang;
 - e. peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan;
 - f. penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut;
 - g. peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar;
 - h. peningkatan produktivitas dan kualitas garam nasional disertai dengan pengelolaan garam dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam;
 - i. pengelolaan kawasan wisata bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
 - j. peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
 - k. pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil;

- l. pemanfaatan air laut, pengelolaan biofarmakologi, dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi;
- m. penguatan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut;
- n. penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi rencana zonasi kawasan laut, rencana zonasi wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, rencana aksi dan peninjauan kembali, serta penyelarasannya dengan rencana tata ruang;
- o. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya antara lain melalui pelaksanaan perizinan lokasi perairan dan penyelenggaraan kadaster laut;
- p. peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan SDKP;
- q. operasional armada pengawasan SDKP;
- r. penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya);
- s. peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP;
- t. pengembangan SDM aparatur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
- u. peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- v. operasional pengawasan ekspor, impor, dan domestik;
- w. harmonisasi sistem perkarantina dan keamanan hayati ikan dalam dan luar negeri, sinergi pengawasan lalu lintas ikan, penguatan pengawasan karantina ikan di lintas batas negara (darat/laut), dan bandara/pelabuhan;
- x. penguatan operasional pengawasan dan penindakan pelanggaran dibidang karantina ikan dan keamanan hayati ikan;
- y. peningkatan sarana dan prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, karantina ikan, dan laboratorium uji (reference dan destructive fishing);
- z. pengembangan SKPT; dan
- aa. peningkatan Unit Pelaksana Teknis pengelolaan ruang laut, Unit Pelaksana Teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan Unit Pelaksana Teknis karantina ikan.

5. arah kebijakan “Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
 - a. peningkatan riset untuk menyediakan data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan (stock assessment) di WPPNRI dan Perairan Umum Daratan (PUD);
 - b. peningkatan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan Hak Kekayaan Intelektual (KHI)/paten dengan pemerintah daerah, UKM, dan dunia usaha dan industri;
 - c. peningkatan dukungan riset dan teknologi dalam pengambilan kebijakan science based policy untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan;
 - d. peningkatan hasil riset dan inovasi teknologi yang mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan;
 - e. pengembangan pusat unggulan riset sehingga menjadi center of excellence dalam riset dan inovasi teknologi kelautan dan perikanan;
 - f. pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan teaching factory dan memperkuat link and match berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, serta menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. pengembangan sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan standar internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
 - h. pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri berkerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan;
 - i. perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang berbasis digital (e-learning, e-training, e-extension);
 - j. pengembangan kelembagaan pendidikan vokasi, pelatihan, dan riset kelautan dan perikanan;
 - k. penguatan sistem penyuluhan berbasis hasil riset Research Extension Linked (REL) untuk mendukung program kementerian dan kebijakan peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;

- l. peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai standar nasional dan internasional, termasuk peningkatan kapasitas tenaga peneliti, pendidik, pelatih, dan penyuluh;
- m. peningkatan kerja sama dan sinergitas riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan lembaga nasional dan internasional;
- n. peningkatan kapasitas UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi

Untuk pembangunan kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan tahun 2021 - 2026. Untuk lebih jelasnya dalam menganalisis pelayanan Perangkat daerah berdasarkan sasaran Renstra PD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan (Laut, Perairan Umum dan Budidaya)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan armada penangkapan ikan >30 GT - Masih banyaknya nelayan yang masih menggunakan alat penangkapan sederhana - Sebahagian besar armada penangkapan ikan nelayan masih <3 GT, sehingga sangat terbatas ruang penangkapannya - Masih rendahnya pengetahuan nelayan tentang teknologi penangkapan ikan - Belum optimalnya pemanfaatan potensi budidaya ikan - Masih rendahnya teknologi budidaya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses kepengurusan Izin penangkapan kapal .30 GT harus kepusat dan sangat lama izin terbitnya - Minimnya anggaran untuk revitalisasi alat penangkapan ikan yang modm dan ramah lingkungan - Minimnya anggaran untuk pengadaan kapal lebih besar dari 3 GT - Factor lingkungan yang menjadi kendala utama belum optimalnya pemanfaatan potensi budidaya ikan - Tenaga ahli masih kurang, sehingga belum bisa melayanai sekian 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi harus lebih ditingkatkan supaya kepengurusan perizinan segera terbit - Inovasi alat penangkapan ikan mempunyai peluang untuk dikembangkan - Revitalisasi armada penangkapan ikan dengan permohonan bantuan ke provinsi dan pusat - SDM nelayan ada, sehingga potensi untuk dikembangkan masih berpeluan - Potensi budidaya cukup luas, dan masih sedikit yang dimanfaatkan, ad ape, uang besar dalam

		<ul style="list-style-type: none"> - Masih sedikitnya minat masyarakat untuk usaha budidaya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - banyak pembudidaya ikan - Masih belum optimalnya penanganan pasca panen. 	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan perikanan budidaya - Kajian dan pembinaan bisa bekerja sama dengan instansi yang kompeten di bidang perikanan budidaya - Pengembangan pasar dan penanganan pasca panen harus ditingkatkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat
2.	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Data yang belum akurat - Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan - Masih banyak masyarakat yang tidak suka mengkonsumsi ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM pendata masih sangat terbatas - Masih minimnya himbauan kepada masyarakat akan pentingnya makan ikan - Kurangnya inovasi pengolahan hasil ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Harus ada kerja sama dengan BPS untuk mendapatkan data yang akurat - Sumberdaya ikan cukup banyak dan lebih murah dan tanpa ada resiko penyakit yang mematikan - Pasar yang sangat menjanjikan terhadap hasil pengolahan perikanan
3.	Meningkatnya Lingkungan Pesisir Kualitas Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan - Masih kurangnya sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat tentang wawasan kemaritiman - Banyaknya tanaman mangrove yang ditebang - Masih adanya masyarakat dalam pemanfaatan SDKP dengan cara yang dilarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah ini tidak bisa DPK saja yang melaksanakan, harus lebih ditingkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait - Sangat minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pembinaan masalah was an kemaritiman - Batang mangrove banyak dimanfaatkan untuk kepentingan rumah tangga - Petugas patrol sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi strategis untuk dikembangkan - Peningkatan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak akademis untuk embantu memberikan pengertian kepada masyarakat - Hampirsetiap tahun dilakukan penanaman mangrove - Perlu membentuk pengawas swakarsa masyarakat dalam mengawasi pelanggaran di lingkungan sekitarnya
4.	Meningkatnya Pendapatan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ketidak akuratan data bidang kelautan dan perikanan dalam menentukan kebijakan pembangunan perikanan dan kelautan - Sangat susah merubah mainset nelayan cara hidup hemat dan gemar menabung - Masih minimnya minat masyarakat dalam usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas statistic yang sangat terbatas - Masih rendahnya koordianasi antar pemangku kepentingan pada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan - Kualitas lingkungan yang kurang bagus untuk usaha perikanan, 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah dilakukan pendataan akan tetapi harus perlu ditingkatkan lagi - Peningkatan koordinasi dngan pemangku kepentingan - Melakukan kerja sama dengan instansi yang berkompeten dalam penelitian dan

		perikanan dan kelautan terutama usaha budidaya	khususnya perikanan budidaya dalam tambak	pengembangan potensi budidaya ikan
5.	Meningkatnya Jumlah Produksi Induk yang Bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga teknis Budidaya masih sangat terbatas - Perlu ada kajian pengembangan pembenihan di daerah yang mempunyai sumber air lebih bagus daripada yang sekarang 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran dalam perekrutan tenaga teknis pembenihan - Lahan yang terbatas dalam pengembangan BBI baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi yang cukup besar dalam pengembangan pembenihan - Harus ada kajian secara mendalam pada daerah yang dianggap layak dalam pengembangan pembenihan
6.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja di Bidang Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih belum meratanya bantuan perikanan dan kelautan kepada masyarakat - Masih minimnya pembinaan tentang usaha perikanan dan kelautan yang sangat menjajikan - Masih belum akuratnya pendataan daerah prioritas pengembangan perikanan, khususnya perikanan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan yang belum optimal - Masih banyak masyarakat yang menganggap usaha perikanan adalah usaha sampingan - Lokasi yang luas dengan petugas pendata yang sangat terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi usaha perikanan dan kelautan yang cukup bagus - Masih ada minat masyarakat dalam usaha perikanan dan kelautan - Kerja sama dengan BPS harus perlu ditingkatkan
7.	Meningkatnya Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya anggaran untuk pembinaan dan pengembangan usaha budidaya ikan - Lingkungan yang terdegrasi oleh kepentingan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi tanpa memperhatikan lingkungan perairan - Masih terbatasnya pembinaan dan pelatihan usaha budidaya ikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Data yang belum akurat, sehingga usulan masih banyak di tolak - Aktifitas industry maupun rumahtangga yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan - Minimnya anggaran untuk pembinaan dan pelatihan usaha perikanan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SDM pendata - Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait - Meyusun anggaran prioritas untuk meningkatkan minat masyarakat dalam usaha budidaya ikan
8.	Meningkatnya Jumlah RTP Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya petugas pendata RTP Perikanan Tangkap - Bantuan perikanan yang belum merata - Belum memperhitungkan prioritas dalam pembangunan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya petugas pendata RTP Perikanan - Terbitnya Pemendagri tentang teknis bantuanhibah dan Bansos, sehingga kegiatan terbentur pada aturan tersebut - Belum adanya pemetaan prioritas pembangunan perikanan tangkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SDM pendata - Konsultasi dengan pihak terkait - Perlu adanya kajian dalam penentuan prioritas pembangunan perikanan tangkap
9.	Meningkatnya Jumlah Pengelola Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran dalam pengembangan pengelolaan dan inovasi hasil perikanan - Sangat sulitnya memanajern pengolah yang ada untuk membentuk usaha kelompok bersama - Masih minimnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan sering kali ditolak karena usulan dana untuk pengembangan dan inovasi pengolahan hasil perikanan cukup besar - Terbatasnya SDM yang kompeten dibidang ini 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi cukup bagus untuk dikembangkan menjadi produk yang mempunyai nilai tambah - Perlu adanya kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten dalam masalah ini - Masih adanya minat

		pengetahuan masyarakat tentang pengolahan dan pemasaran	- Masih rendahnya pembinaan dan pelatihan pengolahan hasil	masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan
10.	Meningkatnya Jumlah Kelompok Pengawas Masyarakat Swakarsa/Mandiri	- Masih kurangnya pembinaan kepada masyarakat dalam pengawasan perikanan mandiri	- Masih banyak masyarakat yang enggan untuk menjadi anggota POKMASWAS	- Medan yang cukup luas yang tidak mungkin hanya diawasi oleh Dinas teknis yang SDMnya sangat terbatas
11.	Bertambahnya Kawasan Konservasi/Reservat Perikanan	- Kajian terhadap kawasan konservasi/reservat masih sangat kurang	- SDM yang berkompeten sangat terbatas	- Potensi cukup banyak untuk pembentukan kawasan konservasi/reservat perikanan
12.	Meningkatnya Jumlah Armada Perikanan Tangkap >10 GT	- Minimnya anggaran dalam kegiatan ini, karena untuk revitalisasi armada perikanan membutuhkan dana yang tidak sedikit	- Anggaran masih diprioritas untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan dan sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan	- Mengajukan permohonan bantuan dari APBD I maupun APBN

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Sehingga secara khusus ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Paragraf empat Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 38 yang berisikan :

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Kawasan peruntukan perikanan budi daya;
 - c. Kawasan peruntukan pengolahan perikanan; dan
 - d. Krasarana perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 65.500 (enam puluh lima ribu lima ratus) hektar, meliputi :

- a. kawasan perikanan tangkap sungai dengan luas kurang lebih 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) hektar dengan komoditas unggulan terdapat unggulan Ikan Baung, Ikan Sepat, Ikan Siam, Ikan Gabus, Ikan Lele, Ikan Betok, Ikan Tambakan, Ikan Belidas, Ikan Lais, dan Udang di Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Kuala Betara; dan
 - b. kawasan perikanan tangkap laut dengan jalur penangkapan ikan diatas 2 mil laut hingga 12 mil laut dengan luas kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) hektar dengan komoditas Ikan Kembung, Ikan Layang, Ikan Bawal Putih, Ikan Bawal Hitam, Ikan Kakap, Udang Putih, dan Udang terdapat di Kecamatan Pangabuhan, Kecamatan Pangkal Duri dan Kecamatan Kuala Betara.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 6.200 (enam ribu dua ratus) hektar meliputi :
- a. Kawasan perikanan budidaya tambak dengan luas kurang lebih 5000 (lima ribu) hektar dengan komoditas unggulan Udang Windu, Udang Vaname dan Bandeng di Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Kuala Betara;
 - b. Kawasan Perikanan Budidaya kolam dengan luas kurang lebih 1000 (seribu) hektar dengan komoditas unggulan Ikan Nila, Ikan Patin, Ikan Bawal Air Tawar, Ikan Gurami dan Ikan Lele; dan
 - c. Kawasan Perikanan Budidaya jaring apung/keramba dengan luas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar dengan komoditas unggulan Ikan Patin, Ikan Nila Tomang dan Udang Galah terdapat di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, Kecamatan Betara dan Kecamatan Pengabuan.
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, dan Kecamatan Kuala Betara.
- (5) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Bram Itam; dan
 - b. pengembangan pelabuhan perikanan Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir; dan
 - c. rencana pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Sungai Dualap Kecamatan Betara.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap	- Daerah peruntukan untuk perikanan tangkap sudah tepat akan tetapi untuk perairan umum perlu kajian teknis untuk menentukan lokasi penangkapan ikan yang lestrai dan berwawasan lingkungan	- Belum adanya kajian secara teknis dalam menentukan lokasi penangkapan ikan perairan umum	- Potensi yang cukup besar dalam pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan umum
2.	Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya	- Dalam RTRW Kabupaten kawasan pengembangan perikanan budidaya tidak semua masuk, padahal setiap kecamatan dalam kabupaten mempunyai potensi perikanan yang berbeda-beda - Belum adanya kajian penentuan lokasi pengembangan budidaya ikan dilihat dari perbedaan geografisnya	- Lokasi yang luas, dan geografis di Kab. Tanjung Jabung Barat berbeda anatar ilir dan ulu, sehingga perlu kajian teknis yang mapan	- Semua kecamatan dalam kabupaten mempunyai potensi yang berbeda-beda dan mempunyai peluang untuk dikembangkan
3.	Kawasan Peruntukan Pengolahan Perikanan	- SDM yang masih terbatas	- Lokasi sudah tepat akan tetapi masih banyak yang harus dikembangkan, baik saparnya, bahan bakunya dan SDMnya	- Lokasi Strategis karena Kab. Tanjung Jabung Barat terletak di segitiga emas yang kedepan mempunyai potensi berkembang sangat pesat
4.	Prasarana Perikanan	- Terbatasnya anggaran dalam pengembangan prasarana perikanan	- Data yang belum akurat, sehingga dalam menentukan	- Lokasi Strategis karena Kab. Tanjung Jabung Barat terletak

			program dan kebijakan sering kali kurang tepat sasaran	di segetiga emas yang kedepan mempunyai potensi berkembang sangat pesat
5.	Kawasan Minapolitan	- RTRW dengan dengan Keputusan Bupati tidak sinkron, dimana keputusan Bupati penentuan lokasi kawasan minapolitan terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir, akan tetapi dalam RTRW kawasan minapolitan terdapat di Kec. Kuala Betara	- Kurangnya koordinasi pihak penyusun dengan dinas teknis terkait	- Potensi strategis di Kecamatan Tungkal Ilir, karena infrastruktur di daeah Tungkal Ilir lebih lengkap dan tinggal pengembangan sedikit.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi permintaan kebutuhan pasar akan komoditi sektor kelautan dan perikanan baik secara kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keragamannya baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Pembangunan kelautan dan perikanan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaannya menjadi lebih tepat sasaran. Posisi geostrategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam konstelasi regional dan nasional belum terlalu dikenal sehingga ke depan pembangunan perikanan perlu ditingkatkan lagi dengan cara promosi daerah. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunannya sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 - 2025 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu strategis, permasalahan dan dampaknya yang dihadapi dapat dilihat dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4. Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Kelautan dan Perikanan

NO.	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	DAMPAK
I.	ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP		
	ASPEK EKONOMI		
1.	Daya saing produk perikanan Tangkap dan Pengolahan yang masih Rendah	- Pemasaran produk perikanan khususnya ekspor udang ketak dan Ikan belum optimal	- Berkurangnya pendapatan Nelayan
		- Packing produk yang belum Optimal	- Produk hasil perikanan kurang diminati
		- Keterbatasan sarana dan pra-sarana penangkapan ikan	- Hasil penangkapan tidak Maksimal
		- Kurangnya bahan baku Pengolahan Hasil Perikanan	- berkurangnya produk Hasil Perikanan
2.	Keterbatasan modal untuk Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap dan Pengolahan	- Kurangnya pengetahuan nelayan mengenai akses dan cara mendapatkan kredit di lembaga keuangan	- Usaha perikanan tangkap relatif stagnan tanpa ada peningkatan pendapatan nelayan
	ASPEK SOSIAL		
1.	SDM nelayan masih relatif rendah	- Peningkatan kompetensi dan sertifikasi nelayan	- Rendahnya keterampilan dan kecakapan nelayan
	ASPEK KELEMBAGAAN		
2.	Lemahnya kelompok dalam berorganisasi	- Lemahnya kapasitas nelayan dalam mengelola administrasi kelompok usaha bersama perikanan tangkap	- Kelompok Usaha Bersama secara umum masih berada pada kelas kelompok pemula
3.	Masih terhambatnya pembuatan perizinan	- Belum adanya Standar Operasional prosedur pembuatan perizinan menggunakan aplikasi OSS	- Banyaknya pelaku usaha perikanan tangkap yang tidak memiliki izin usaha
	ASPEK LINGKUNGAN		
1.	Kegiatan Illegal, Unregulated dan Unreported (IUU) Fishing	- Belum optimalnya pengawasan Sumberdaya Ikan oleh Petugas	- Sumberdaya ikan akan mengalami degradasi dan overfishing
II.	ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PERIKANAN BUDIDAYA		
	ASPEK EKONOMI		
1.	Besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan	- Pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik.	- Ongkos produksi meningkat sehingga membutuhkan modal usaha yang lebih besar
		- Kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan	- Keuntungan pembudidaya berkurang

		-	Industri penyediaan bahan baku pakan lokal masih sangat terbatas	-	Usaha budidaya ikan skala kecil akan mengalami degradasi hingga menuju kebangkrutan
2.	Skala Usaha Pembudidaya Ikan	-	Pembudidaya Ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bukan menjadi usaha pokok akan tetapi usaha sampingan	-	Sulit untuk dikembangkan Pengusahaannya
		-	Sebagian besar kualitas SDM pembudidaya ikan masih terbatas	-	Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan skala kecil akan sulit ditingkatkan, karena tidak memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik
3.	Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas	-	Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi pembudidaya skala kecil	-	Usaha budidaya perikanan skala kecil tidak akan berkembang
4.	Sistem logistik	-	Infrastruktur pendukung masih terbatas (jalan, listrik, BBM, dll.)	-	Biaya produksi meningkat sehingga usaha budidaya menjadi kurang efisien
		-	Kualitas produk dan harga jual tidak menentu	-	Daya saing produk menjadi lemah
ASPEK SOSIAL					
1.	Teknologi dan sistem produksi	-	Ketersediaan benih bermutu tinggi masih terbatas	-	Pembudidaya tidak leluasa untuk meningkatkan skala usaha dan atau mengaplikasikan teknologi untuk efisiensi usaha
		-	Akses terhadap teknologi terbatas		
		-	Umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan atau sistem semi-intensif		
2.	Masalah pengamanan kualitas ikan	-	Tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya ikan masih kurang	-	Akan terjadi penggunaan bahan-bahan yang berbahaya untuk dalam proses produksi budidaya ikan.
ASPEK LINGKUNGAN					
1.	Penurunan kualitas perairan	-	Masa pemeliharaan ikan semakin lama	-	Produktivitas budidaya perikanan akan menurun
		-	Ikan lebih mudah terkena penyakit	-	Biaya produksi akan meningkat
		-	Konversi pakan makin tinggi (boros pakan)	-	Dalam jangka panjang kegiatan usaha perikanan budidaya menjadi tidak menarik lagi
ASPEK KELEMBAGAAN					
1.	Sistem pendataan perikanan budidaya belum andal dan efisien	-	Mekanisme sistem pencatatan data perikanan budidaya belum tepat, cepat, dan efisien	-	Rumusan Kebijakan dan Program Pembangunan Perikanan Budidaya Tidak Tepat Sasaran
		-	Terbatasnya SDM pengelola data perikanan budidaya	-	Salah kebijakan dalam pengelolaan perikanan budidaya

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan pencapaian misi ketiga dari RPJMD Kabupaten, yaitu Peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Misi keempat dari RPJMD Kabupaten, yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.

Indikator tujuan RPJMD dari misi ketiga adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dan misi keempat adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten yang Berkelanjutan. Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Meningkatnya Perekonomian Kabupaten dengan indikator sasaran adalah :

1. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Indeks Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)
3. Indeks Nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (Kg/Kpt/Thn)

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah "Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel serta Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan Berbasis Optimalisasi Sumberdaya dan

Pemberdayaan Masyarakat”. Adapun sasaran dari tujuan adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Meningkatnya Usaha Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan. Adapun tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	
Urusan Pilihan : Kelautan dan Perikanan					
T.1	Terselenggaranya tata kelola Perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	S.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	S.1.1.	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
T.2	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan Berbasis Optimalisasi Sumberdaya dan Pemberdayaan Masyarakat	S.2	Meningkatnya Usaha Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan	S.1.2.	Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)
				S.1.3.	Nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (Kg/Kpt/Thn)

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut di atas bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan masing-masing komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, dan indikator kegiatan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat hirarki kinerja Dinas Perikanan termasuk dalam struktur jabatan (*eselon*), sehingga dapat diketahui tanggung jawab masing-masing *eselon*. Penjabaran tersebut memberikan kemudahan Dinas Perikanan dalam menyusun perjanjian kinerja, dan komponen lainnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kerangka keterkaitan tersebut disajikan dalam pohon kinerja sebagai berikut :

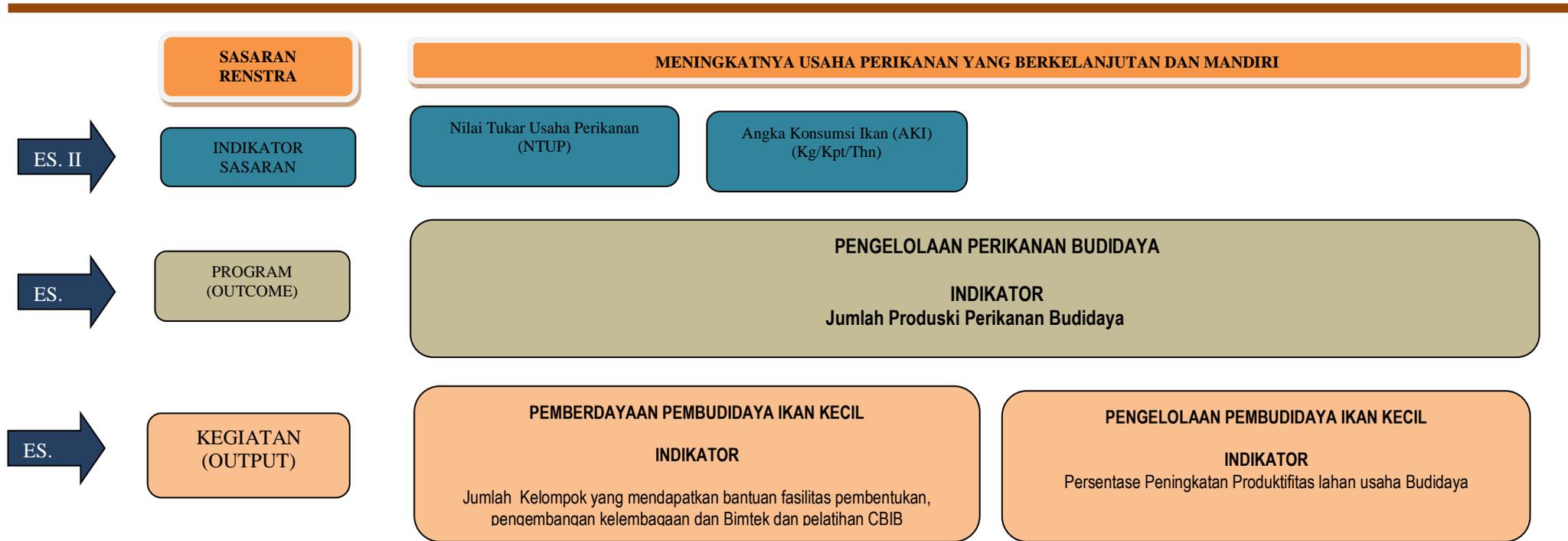
Gambar 4.1.
Pohon Kinerja Sasaran Sektor Kelautan dan Perikanan
Bidang Perikanan Tangkap

SASARAN RPJMD : Meningkatnya Perekonomian Kabupaten
INDIKATOR : Laju Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 4.2.
Pohon Kinerja Sasaran Sektor Kelautan dan Perikanan
Bidang Perikanan Budidaya

SASARAN RPJMD : Meningkatkan Perekonomian Kabupaten
INDIKATOR : Laju Pertumbuhan Ekonomi



Selanjutnya target kinerja dari sasaran strategis pembangunan sektor perikanan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2021 - 2026. Adapun target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025 tersaji dalam tabel matrik sebagaimana berikut :

Tabel 4.2. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi IKU	Tahun Dasar 2020	Target Kinerja, Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir (Transisi)			
					1	2	3	4	5	6				
Urusan Pilihan : Kelautan dan Perikanan														
T.1	Terselenggaranya tata kelola perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	S.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	S.1.1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi Tim AKIP Daerah	68	70	71	72	73	74	75	75
T.2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan Berbasis Optimalisasi Sumberdaya dan Pemberdayaan Masyarakat	S.2	Meningkatnya Usaha Perikanan yang Berkelanjutan dan Mandiri	S.1.2.	Nilai Tukar usaha Perikanan (NTUP)	Nilai NTUP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana komponen Ib hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib)	109,77	>110	>111	>112	>113	>114	>115	>115
				S.1.3.	Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (Kg/Kpt/Thn)	Ketersediaan Ikan/Jumlah Penduduk <u>Dimana :</u> Ketersediaan ikan yang dimaksud didalamnya mencakup total produksi ikan (tangkap dan budidaya) ditambah impor dan stok, kemudian dikurangi dengan ekspor dan produksi ikan <i>non</i> pangan.	35,79	35,8	36,10	36,13	36,15	36,18	36,20	36,20

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan sektoral bidang kelautan dan perikanan. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari *Strength* (Kekuatan) dan *Weakness* (Kelemahan) merupakan faktor internal SKPD, sedangkan *Opportunity* (Peluang) dan *Threat* (Ancaman) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi SKPD dari luar. Berikut adalah analisis SWOT sektor perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sektor Kelautan dan Perikanan

<p>Kekuatan (Strength) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah daerah menetapkan sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan penunjang laju pertumbuhan ekonomi dan pendukung ketahanan pangan; 2) Potensi perikanan tangkap dan budidaya sangat besar dan masih bisa ditingkatkan; 3) Nelayan Tanjung Jabung Barat memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan kelompok; 4) Pemerintah telah memiliki aset BBI yang cukup layak 5) Tersedianya anggaran pembangunan perikanan dari APBD kabupaten dan propinsi serta APBN 	<p>Kelemahan (Weakness) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berkurangnya kewenangan kabupaten/kota dalam menangani pembangunan sektor perikanan; 2) minimnya petugas yang berkualitas dalam pengelolaan BBI sehingga fungsi tidak berjalan optimal; 3) SDM aparatur pemerintah yang menangani urusan perikanan semakin berkurang, karena tidak ada pengangkatan/penerimaan PNS
<p>Peluang (Opportunity) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kesepakatan program ketahanan pangan menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah pusat dan daerah; 2) Posisi geografis Tanjung Jabung Barat yang strategis (segitiga emas) sebagai pintu gerbang distribusi barang antar pulau dan di tingkat nasional; 3) Topografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menunjang keragaman potensi di bidang pertanian (Perikanan) dan produk olahannya; 	<p>Ancaman (Threats) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Globalisasi teknologi, informasi dan transportasi; 2) Persaingan makin ketat akibat pasar bebas dan perlakuan standarisasi internasional; 3) Iklim usaha kurang kondusif; 4) Luasan wilayah yang tidak didukung infrastruktur (jalan) yang memadai akan menghambat arus distribusi barang; 5) Menurunnya kualitas lingkungan; 6) Anggaran pemerintah pusat dan propinsi yang jauh berkurang dalam menunjang program ketersediaan pangan dan pengembangan potensi lokal daerah.

Berdasarkan klasifikasi isu strategis tersebut kemudian disusun strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama lima tahun kedepan dalam matrik *SWOT* sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis *SWOT* dari masing-masing urusan maka dapat dihasilkan strategi dan kebijakan untuk setiap urusan yaitu sebagai berikut:

Strategi 1: Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, Pengelola dan Pemasar serta usaha kecil pembudidayaan ikan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan			
No	Perpektif	Kebijakan Umum	Program
1.	Perspektif 1: Masyarakat	Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha perikanan tangkap yang mandiri dan berkelanjutan	Pengelolaan perikanan tangkap
		Meningkatkan Kemandirian Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		Meningkatkan kemandirian usaha kecil pembudidayaan ikan	Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Peningkatan Kelestarian Lingkungan Kawasan Lindung Perikanan	Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
2.	Perpektif 2 : Proses Internal	-	-
3.	Perpektif 3 : Kelembagaan	Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.	Perpektif 4 : Keuangan	-	-

Merujuk pada strategi tersebut maka disusun kebijakan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha perikanan tangkap yang mandiri dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan Kemandirian Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- c. Meningkatkan kemandirian usaha kecil pembudidayaan ikan;
- d. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Kawasan Lindung Perikanan;
- e. Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka linieritas antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan dapat digambarkan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 5.1. Matrik Lineritas Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Strategi	Kebijakan
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan							
T.1	Terselenggaranya tata kelola perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	S.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	S.1.1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN	Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN Dinas Perikanan
T.2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan Berbasis Optimalisasi Sumberdaya dan Pemberdayaan Masyarakat	S.2	Meningkatnya Usaha Perikanan yang Berkelanjutan dan Mandiri	S.1.2.	Nilai Tukar usaha Perikanan (NTUP)	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, Pengelola dan Pemasar serta usaha kecil pembudidayaan ikan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan	Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha perikanan tangkap yang mandiri dan berkelanjutan
				S.1.3.	Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (Kg/Kpt/Thn)		Meningkatkan kemandirian usaha kecil pembudidayaan ikan
							Meningkatkan Kemandirian Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
							Peningkatan Kelestarian Lingkungan Kawasan Lindung Perikanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian, maka program dan kegiatan untuk tahun 2021-2026 ini, penyusunan program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumberdaya dan sumber dana tertentu. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

A. PROGRAM RUTIN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk peningkatan Administrasi Perkantoran

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik kantor;
 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
 - Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM TEKNIS (URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Tangkap, Peningkatan Produksi Penangkapan dan Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan;
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pengembangan Kapasitas Nelayan;
 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan untuk Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya, Peningkatan Produksi Budidaya dan Benih serta Pembinaan dan Perencanaan Pengembangan Budidaya

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil;
 - Pembinaan, Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 - Perencanaan, Pengembangan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan di Darat.

3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk Kegiatan Pengawasan dan Perlindungan Kawasan Konservasi Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan. Dengan Sub Kegiatan :
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang diusahakan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

4. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan untuk Penyediaan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran serta Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pembinaan dan Promosi.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan dan Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

- c. Penyediaan dan Penyediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Pemberiaan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan yang terkait dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan indikasi pendanaan tersaji dalam table sebagai berikut :

Tabel 6.1. Matriks Tujuan, Sasaran, Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Indikatif Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Periode Awal Renstra	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
								2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah	3	25		DINAS PERIKANAN	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP Dinas	%	2	3	3.637.848	3	4.291.300	3	4.255.200	3	4.333.000	3	4.684.500		4.511.500	5	4.511.500	Dinas Perikanan	Kab. Tanjab Barat
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	Nilai	68	70	3.637.848	71	4.291.300	72	4.255.200	73	4.333.000	74	4.684.500	75	4.511.500	75	4.511.500		
	Meningkatnya Pengelolaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Instansi	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang disusun	Jenis	5	5	32.624	4	45.000	4	48.000	4	51.000	4	55.000	5	60.000	5	60.000,00		
	Meningkatnya Kelerapan Waktu dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun Jumlah Dokumen Renja yang disusun Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RK yang disusun Jumlah Laporan Kinerja yang disusun Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Dokumen Dokumen Dokumen Laporan Laporan	5	1	32.624	0	45.000	0	48.000	0	51.000	0	55.000	1	60.000	1	60.000		
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji/Tunjangan dan Honorarium Pengelola Keuangan	Bulan	12	12	2.957.894	12	3.050.000	12	3.094.000	12	3.128.000	12	3.157.000	12	3.175.000	12	3.175.000		
	Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji/Tunjangan	Orang	24	26	2.816.474	27	2.900.000	28	2.929.000	28	2.958.000	29	2.987.000	30	3.000.000	30	3.000.000		
	Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.02	10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Menerima Honor Pengelola Keuangan	Orang	12	14	141.420	14	150.000	15	165.000	15	170.000	15	170.000	15	175.000	15	175.000		
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai ASN yang disiplin	%	100	100	26.000	100	85.000	100	88.000	100	91.000	100	109.000	100	112.000	100	112.000		
	Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	Stell	64	64	26.000	70	30.000	70	33.000	70	36000	70	39.000	70	42.000	70	42.000		
Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Dinas yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tupoksi	OK	0	0	0	8	55.000	8	55.000	8	55.000	10	70.000	10	70.000	10	70.000			

<i>Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran</i>	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Bulan	12	12	312.141	12	512.500	12	535.200	12	587.000	12	618.000	12	640.000	12	640.000		
Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Macam Komponen Listrik yang disediakan sesuai kebutuhan	Macam	8	8	1.007	10	2.500	10	2.700	15	3.200	15	3.500	15	3.500	15	3.500		
Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Snack yang disediakan (Kotak)	Kotak	150	800	18.200	400	7.000	400	7.500	400	7.800	400	8.000	400	8.000	400	8.000		
Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Macam barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sesuai kebutuhan	Macam	6	6	13.446	7	14.500	7	16.000	8	17.000	8	17.000	8	19.000	8	19.000		
Meningkatnya Pengalihan Perangkat Daerah	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	Eksemplar	1.000	1.500	8.500	1.500	8.500	1.500	9.000	1.500	9.000	1.500	9.500	1.500	9.500	1.500	9.500		
Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan rapat dan konsultasi OPD	Bulan	12	12	270.988	12	480.000	12	500.000	12	550.000	12	580.000	12	600.000	12	600.000		
Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang disediakan sesuai kebutuhan	Unit	63	0	0	14	87.000	14	105.000	8	65.000	8	65.000	11	85.000	11	85.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit mebel yang disediakan sesuai kebutuhan	Unit	21	0	0	8	32.000	10	65.000	4	25000	4	25000	5	30000	5	30.000		
Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana kantor yang disediakan sesuai kebutuhan	Unit	42	0	0	6	55.000	4	40.000	4	40.000	4	40.000	6	55.000	6	55.000		
Meningkatnya Pelayanan dengan pemenuhan Sarana dan Prasarana	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	112.799	12	133.000	12	143.000	12	150.000	12	159.500	12	164.500	12	164.500		
Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	8.410	12	9.500	12	9.500	12	9.500	12	9.500	12	10.000	12	10.000		
Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Pembayaran Tagihan Air Jumlah Waktu Pembayaran Tagihan Listrik	Bulan Bulan	12 12	12 12	52.800	12 12	60.000 12	12 12	65.000 12	12 12	68.000 12	12 12	73.000 12	12 12	75.000 12	12 12	75.000 12		
Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Macam ATK yang disediakan sesuai kebutuhan	Macam	40	40	44.162	60	55.000	60	60.000	60	64.000	60	68.000	60	70.000	60	70.000		
Meningkatnya Pelayanan Administratif Perkantoran	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Macam Alat Kebersihan Kantor yang disediakan	Macam	12	12	7.427	12	8.500	12	8.500	12	8.500	12	9.000	15	9.500	15	9.500		
Meningkatnya Pelayanan dengan pemenuhan Sarana dan Prasarana	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	196.390	12	378.800	12	242.000	12	261.000	12	521.000	12	275.000	12	275.000		

	Meningkatnya Pelayanan dengan pemenuhan Sarana dan Prasarana	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Waktu Penyediaan BBM Peralatan Mesin dan Kendaraan Perorangan Dinas yang disediakan Jumlah Unit Peralatan-mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Unit Peralatan Berat (Excavator) yang dipelihara Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang dipelihara Jumlah Unit Kendaraan Roda 3 yang dipelihara Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 yang dipelihara	Bulan Unit Unit Unit Unit	12 2 1 21 1 4	12 2 1 21 1 4	168.195 	12 2 1 21 1 4	210.000 	12 2 1 21 1 4	220.000 	12 2 1 21 1 4	235.000 	12 2 1 21 1 4	243.000 	12 2 1 21 1 4	245.000 	12 2 1 21 1 4	245.000 		
	Meningkatnya Pelayanan dengan pemenuhan Sarana dan Prasarana	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan- mesin gedung kantor yang dipelihara	Unit	18	18	13.930	22	18.800	26	22.000	30	26.000	34	28.000	36	30.000	36	30.000		
	Meningkatnya Pelayanan dengan pemenuhan Sarana dan Prasarana	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang direhabilitasi sesuai dengan kebutuhan	Unit	0	1	14.265	1	150.000	0	0	0	0	1	250.000	0	0	0	0		
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan berbasis Optimalisasi Sumberdaya dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Usaha Perikanan yang Mandiri dan Berkelanjutan	3	25		DINAS PERIKANAN	Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah	Indeks Kg/Kp/Thn	109,77 35,79	>110 35,8	4.104.850	>111 36,10	22.645.305	>112 36,13	28.610.810	>113 36,15	29.265.315	>114 36,18	34.265.570	>115 36,20	39.487.070	>115 36,20	39.444.070	Dinas Perikanan	Kab. Tanjab Barat
	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	22.442	22.666	1.084.400	23.119	15.702.805	23.581	20.770.310	24.053	18.129.815	24.534	27.280.070	25.349	28.261.570	25.349	28.261.570		
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jenis	5	4	993.600	7	15.034.250	6	20.101.750	6	17.461.250	7	26.611.500	7	27.593.000	7	27.593.000		
	Tersedianya Data Statistik Perikanan Tangkap yang Valid dan Terbaru	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Dokumen Statistik Perikanan Tangkap yang valid dan terbaru yang disediakan	Dokumen	1	1	19.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	30.000	1	30.000		
	Meningkatnya Prasarana Perikanan Tangkap	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana pelepasan ikan yang direhabilitasi Jumlah dermaga tambat perahu yang disediakan	Paket Paket	0 0	0 0	0 0	1 1	612.500 0	0 1	397.500 0	0 1	390.000 0	1 1	640.000 0	1 1	680.000 0	1 1	680.000 0		

					Jumlah alat penunjang tempat pelanggan ikan yang disediakan	Paket	0	0		1		2		1		1		1	+	1		
Meningkatnya Sarana Perikanan Tangkap	03	2.01	03	Penjamaan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Alat Tangkap Ramah lingkungan yang disediakan	Piece	15	10	974.600	45	14.396.750	45	19.679.250	75	17.046.250	60	25.946.500	70	26.883.000	70	26.883.000	
					Jumlah unit mesin penggerak kapal/perahu yang disediakan	Unit	15	21		100		90		90		80		80		80		
					Jumlah armada perikanan yang laik tangkap dan laik simpan	Unit	25	3		82		99		112		114		116		116		
					Jumlah Kapal/Perahu Nelayan yang dilaminasi Fiber	Unit	20	30		40		30		30		40		30		30		
					Jumlah alat bantu penangkapan yang disediakan	Unit	15	0		60		80		100		100		100		100		
					Jumlah Penerima Manfaat Sarana Perikanan Tangkap	Kelompok	18	18		25		30		30		30		30		30		
Meningkatnya Kemandirian Kelompok dalam Usahanya	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan yang Mandiri	KUB	4	4	90.800	4	668.555	4	668.560	4	668.565	4	668.570	4	668.570	4	668.570	
Meningkatnya daya Tahan dan Pemahaman Asuransi nelayan/Kartu KUSUKA	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang mendapatkan peningkatan keterampilan, pendampingan Asuransi Nelayan dan kartu KUSUKA	Orang	100	100	54.250	430	632.000	430	632.000	430	632.000	430	632.000	430	632.000	430	632.000	
Meningkatnya Jumlah Kelompok Nelayan yang Mandiri	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang difasilitasi Pendampingan Penguatan Kelembagaan	Orang	100	100	36.550	100	36.555	100	36.560	100	36.565	100	36.570	100	36.570	100	36.570	
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.135	1.158	1.074.540	1.187	4.796.500	1.217	5.075.500	1.248	4.765.500	1.280	4.510.500	1.310	4.645.500	1.310	4.652.500	
Meningkatnya kelompok yang mendapatkan legalitas dan mendapatkan pelatihan pembudidayaan ikan yang baik dan benar	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan fasilitas pembentukan, pengembangan kelembagaan, Bimtek dan pelatihan CBIB /CPIB dan Pelatihan Pembuatan pakan Ikan	Kelompok, Lembaga dan Organisasi Masyarakat	9	9	60.704	16	130.000	20	175.000	20	180.000	20	170.000	20	170.000	20	170.000	
Meningkatnya Jumlah Pembudidayaan Ikan yang Mandiri	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan yang difasilitasi Pendampingan Penguatan Kelembagaan	Kelompok, Lembaga dan Organisasi Masyarakat	5	5	20.530	8	45.000	10	75.000	10	80.000	10	80.000	10	80.000	10	80.000	
Meningkatnya Pengetahuan/SDM Pembudidayaan Ikan Kecil	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pembudidayaan Ikan yang mendapatkan Bimtek, Pelatihan Budidaya Ikan dan pelatihan Pembuatan pakan ikan	Orang	40	40	40.174	80	85.000	100	100.000	100	100.000	100	90.000	100	90.000	100	90.000	

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	04	2.03	04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Peningkatan Produktifitas lahan usaha Budidaya	%	2	2	1.013.836	2,5	4.666.500	2,5	4.900.500	2,5	4.585.500	2,5	4.340.500	2,5	4.475.500	2,5	4.482.500		
Tersedianya Data Statistik Perikanan Budidaya yang Valid dan Terbaru	04	2.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Statistik Perikanan Budidaya yang valid dan terbaru yang disediakan	Dokumen	1	1	12.300	1	30.500	1	30.500	1	30.500	1	30.500	1	30.500	1	30.500		
Meningkatnya Prasarana Budidaya Ikan yang memadai	04	2.03	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Perikanan Budidaya yang disediakan	Unit/Paket	0	1	65.876	4	1.900.000	4	1.900.000	3	1.500.000	3	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000		
					Jumlah Prasarana Produksi Pakan Ikan yang disediakan	Unit/Paket	0	1		4		4		4		4		2		2			
					Jumlah Unit Prasarana UPT,UPBAP,BBI yang dibangun/ Rehabilitasi	Unit/Paket	0	1		5		5		4		4		2		2			
Meningkatnya Sarana Budidaya Ikan yang memadai	04	2.03	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perikanan budidaya yang disediakan	Jenis	5	8	766.600	8	2.290.000	8	2.500.000	8	2.560.000	8	2.450.000	8	2.480.000	8	2.487.000		
					Jumlah Sarana Produksi Pakan ikan yg disediakan	Unit /Paket	2	0		5		5		5		5		5		5			
					Jumlah waktu penyediaan belanja jasa kerja petugas teknis dan petugas lapangan di UPT/UPBAP/BBI Yang disediakan	Bulan	12	12		12		12		12		12		12		12			
					Jumlah Penerima Manfaat Sarana Budidaya ikan	Kelompok	12	10		10		10		10		10		10		10			
Menurunnya jumlah kasus ikan yang diserang penyakit.	04	2.03	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan peningkatan kualitas air, obat-obatan dan vitamin ikan yang disediakan	Jenis	2	2	24.060	3	96.000	3	100.000	3	110.000	3	80.000	3	80.000	3	80.000		
					Jumlah Sarana Pengujian/ alat kualitas air budidaya ikan yang disediakan	Unit /Paket	0	1		5		5		5		0		0		0			
					Jumlah Pelaksanaan Pengujian Sampel (Hama Penyakit Ikan, Nutrisi pakan Ikan dan kualitas air lingkungan budidaya ikan)	Kali	4	4		12		12		12		12		12		12			
Meningkatnya Pemanfaatan lahan untuk usaha budidaya ikan	04	2.03	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemantauan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Darat	Jumlah penerima manfaat percontohan budidaya ikan	Kelompok	2	2	145.000	4	350.000	4	370.000	4	385.000	2	280.000	4	385.000	4	385.000		

					Jumlah Dokumen Perencanaan (Kajian teknis/ Uji kelayakan) Lokasi Pengembangan Budidaya Ikan	Dokumen	0	1		1		1		0		0		0		0		
					Jumlah Bidang /lahan pembudidaya ikan yang dapat sertifikasi Hak Atas Tanah	Bidang	15	15		10		10		10		0		10		10		
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumberdaya Ikan	05			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Lokasi	2	4	164.910	6	165.000	6	170.000	6	175.000	6	180.000	6	185.000	6	135.000,00	
Meningkatnya Pelestarian Sumberdaya Ikan di Perairan Umum	05	2.01		Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pembinaan sumberdaya perikanan tangkap di perairan umum	Kali	4	4	164.910	6	165.000	6	170.000	6	175.000	6	180.000	6	185.000	6	185.000,00	
Meningkatnya Pelestarian Sumberdaya Ikan di Perairan Umum	05	2.01	01	Pengawasan usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pembinaan usaha perikanan tangkap di perairan umum	Kali	4	4	164.910	6	165.000	6	170.000	6	175.000	6	180.000	6	185.000	6	185.000	
					Jumlah Sarana Pengawasan dan Pembinaan Usaha Perikanan Tangkap di Perairan Umum	Paket	0	1		1		1		1		1		1		1		
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	2.100	2.184	1.781.000	2.271	1.981.000	2.362	2.595.000	2.480	6.195.000	2.579	2.295.000	2.682	6.395.000	2.682	6.395.000	
Meningkatnya keakuratan data Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Statistik Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan valid dan terbaru yang disediakan	Dokumen	0	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	
Tersedianya Data Statistik Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang Valid dan Terbaru	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Statistik Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan valid dan terbaru yang disediakan	Dokumen	0	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan penerapan persyaratan mutu hasil perikanan	Kegiatan	4	5	370.000	5	370.000	5	370.000	5	370.000	5	370.000	5	370.000	5	370.000	
Meningkatnya Kemadiriian Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standard pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usahamasyarakat perikanan yang mendapatkan bimbingan/pelatihan dan pendampingan usaha	orang	100	150	370.000	150	370.000	150	370.000	150	370.000	150	370.000	150	370.000	150	370.000	

Meningkatnya Daya Saing Produk Pengolahan Hasil Perikanan	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengenalan Produk Pengolahan Hasil Perikanan	kegiatan	5	5	1.386.000	5	1.586.000	5	2.200.000	5	5.800.000	5	1.900.000	5	6.000.000	5	6.000.000		
Terlaksananya Pengenalan dan Inovasi Produk Hasil Perikanan Kabupaten	06	2.03	02	Pembinaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Gemar Makan Ikan dan	Orang	320	400	1.386.000	400	1.586.000	400	2.200.000	400	5.800.000	400	1.900.000	400	6.000.000	400	6.000.000		
					Jumlah UPI yang mendapatkan bantuan usaha	Kelompok	8	8		10		10		10		10		10		10			
					Jumlah Pabrik Es yang difasilitasi pengembangan	Unit	0	0		0		1		1		0		1		1			
					Jumlah Rumah Kemas yang Dikelola	Unit	1	1		1		1		1		1		1		1			
					Jumlah pelaku usaha (UPI) yang mendapat fasilitasi pengenalan produk Pengolahan Hasil Perikanan	Kegiatan	4	4		4		4		4		4		4		4			
JUMLAH TOTAL									7.742.698		26.936.605		32.866.010		33.598.315		38.950.070		43.998.570		43.955.570		

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, pembangunan harus dilakukan dengan arah untuk mengembangkan semua sektor yang menjadi potensi unggulan daerah. Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan salah satu potensi unggulan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang layak dikembangkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Diantara misi RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Adapun tujuan dari Misi ke-3 **“Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”** adalah untuk Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Terkait dengan misi ini maka tujuan yang ditetapkan Dinas Perikanan adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas. Pencapaian Tujuan ini ditandai dengan Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan dari Misi ke-4 **“Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan”** adalah Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan. Terkait dengan misi ini maka tujuan yang ditetapkan untuk Pembangunan dan Kelautan adalah **Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan berbasis Optimalisasi Sumberdaya dan Pemberdayaan Masyarakat.** Pencapaian Tujuan ini ditandai dengan :

- Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap. Indikator Kinerja (Outcome) pencapaian stratgis ini adalah Volume Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.
- Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya. Indikator Kinerja (Outcome) pencapaian stratgis ini adalah Volume Jumlah Produksi Perikanan Budidaya.
- Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumberdaya Ikan. Indikator Kinerja (Outcome) pencapaian stratgis ini Cakupan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Indikator Kinerja (Outcome) pencapaian stratgis ini adalah Volume Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan.

Dari penjabaran di atas maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP).
3. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah.

Berdasarkan Uraian di atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat Dalam Tabel 7.1. sebagai berikut :

Tabel. 7.1. Rencana Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan selama 5 (lima) Tahun

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar 2020	Target Kinerja, Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-						Kondisi Akhir (Transisi)	
				1	2	3	4	5	6		
Urusan Pilihan : Kelautan dan Perikanan											
T.1	Terselenggaranya tata kelola perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	S.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja	S.1.1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68	70	71	72	73	74	75	75
T.2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan Berbasis Optimalisasi Sumberdaya dan Pemberdayaan Masyarakat	S.2 Meningkatnya Usaha Perikanan yang Berkelanjutan dan Mandiri	S.1.2. Nilai Tukar usaha Perikanan (NTUP)	109,77	>110	>111	>112	>113	>114	>115	>115
			S.1.3. Angka Konsumsi Ikan (AKI) Daerah (Kg/Kpt/Thn)	35,79	35,8	36,10	36,13	36,15	36,18	36,20	36,20

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan yang diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Sebagaimana disebutkan pada BAB terdahulu bahwa Renstra SKPD ini disusun dengan mempertimbangkan aspek legalitas, aspek perimbangan kewenangan pusat dan daerah terutama dalam era otonomi pembangunan dan aspek perencanaan strategis, dikemukakan pula visi, misi dan selanjutnya dirumuskan kedalam prioritas kebijakan pembangunan, serta melalui penetapan tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, dan program pembangunan.

Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh Pejabat dan Staf serta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kita perlukan, agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Demikian penyusunan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan secara umum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan pelayanan umum (*public service*) di bidang Kelautan dan Perikanan.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita sekalian. Amin Ya Robbal Alamain.

SEMOGA BERMANFAAT.....!!!!

***'Perencanaan yang baik bukan berarti segala-galanya, Tetapi
Tanpa perencanaan yang baik, segala-galanya menjadi tidak berarti'***

Kuala Tungkal, 2 September 2021

KEPALA DINAS,



Ir. NETTY MARTINI, M.Sc.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650913 199703 2 001